

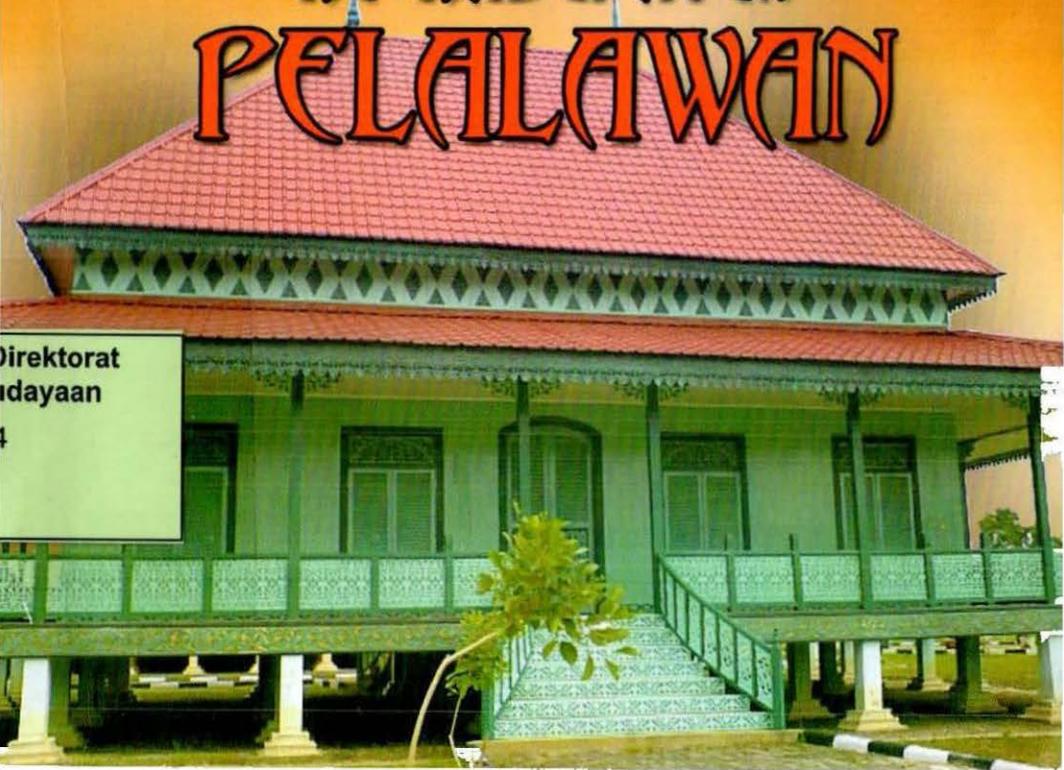
ANASTASIA WIWIK SWASTIWI

PELABAWAN :

DARI
PEKANTUA
KE KABUPATEN
PELALAWAN

Direktorat
Pendidikan dan Kebudayaan

4



Anastasia Wiwik Swastiwi

**PELALAWAN: DARI
PEKANTUA KE
KABUPATEN PELALAWAN**

Editor: Dwi Sobuwati



**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai
Tradisional Tanjungpinang
2011**

PELALAWAN: DARI PEKANTUA KE KABUPATEN PELALAWAN

Penulis

Anastasia Wiwik Swastiwi

Editor

Dwi Sobuwati

Desain Cover

Syamsul Anwar

Tata Letak

Syamsul Anwar

Penerbit

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional

Tanjungpinang

2011

ISBN 978-979-1281-50-8

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta

PASAL 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 72

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sambutan **Direktur Tradisi dan Seni Rupa**

Indonesia merupakan negara dengan komposisi budaya dan etnik yang majemuk. Dengan kondisi itu, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia harus selalu dijaga karena kemajemukan yang dimiliki berpotensi menimbulkan konflik dan desintegrasi. Untuk tetap menjadi negara yang tangguh, dalam diri setiap anak bangsa perlu dibangun rasa nasionalisme yang berakar pada kebanggaan atas jatidiri bangsanya, termasuk kebanggaan akan sejarah dan kebudayaan dari setiap daerah yang berada dalam naungan NKRI. Sehubungan dengan itu, penelitian yang mengungkapkan berbagai sejarah dan budaya daerah perlu dilakukan dan hasilnya diinformasikan kepada masyarakat luas. Dengan memahami sejarah dan budaya dari setiap daerah yang ada di Indonesia, maka masyarakat Indonesia diharapkan memiliki kesadaran akan kekayaan bangsa yang harus dijaga keberadaannya.

Kajian sejarah tentang daerah Pelalawan, suatu daerah yang saat ini menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Riau, merupakan upaya untuk mengungkapkan identitas dan jati diri daerah tersebut. Pemaparan perkembangan Pelalawan dari masa ke masa serta keberhasilan pembangunannya tentu akan membanggakan masyarakat Pelalawan.

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, saya menyambut dengan gembira penerbitan buku hasil penelitian dari **Anastasia Wiwik Swastiwati** yang berjudul **Pelalawan: Dari Pekantua Ke Kabupaten Pelalawan**. Harapan saya melalui buku ini wawasan masyarakat tentang sejarah suatu daerah semakin bertambah. Dengan wawasan pemikiran yang luas, diharapkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara juga semakin baik.

Jakarta, Desember 2011
Direktur Tradisi dan Seni Rupa,


Dra. Watie Moerany, S. M.Hum
NIP. 19561227 198303 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Tanjungpinang dapat melakukan berbagai penelitian di bidang kebudayaan dan kesejarahan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, BPSNT Tanjungpinang memiliki tugas utama melakukan penelitian kesejarahan dan budaya di wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian yang merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan program inventarisasi dan dokumentasi, diperlukan tidak hanya sebagai bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan dalam bidang kebudayaan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang membutuhkan informasi atau data tentang berbagai nilai budaya. Agar tujuan tersebut tercapai, maka hasil-hasil penelitian sudah seharusnya diterbitkan dalam bentuk buku dan selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal itu, sebagai wujud komitmen terhadap tanggungjawab yang diembannya, maka pada tahun 2011 ini, BPSNT Tanjungpinang menerbitkan buku hasil penelitian berjudul **Pelalawan: Dari Pekantua Ke Kabupaten Pelalawan**. Untuk itu BPSNT Tanjungpinang mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan sehingga dapat dihasilkan buku penelitian ini dan terlaksana penerbitannya.

Harapan kami, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberi kontribusi terhadap pembangunan kebudayaan.

Kepala
Balai Pelestarian Sejarah dan
Nilai Tradisional Tanjungpinang


Drs. Suartjan
NIP. 19630101 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	7
BAB I Pendahuluan	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Permasalahan	11
1.3 Tujuan	13
1.4 Ruang Lingkup	14
1.5 Metode	14
BAB II Asal Usul Nama Daerah Kabupaten Pelalawan	16
2.1 Pekantua	16
2.2 Pelalawa	18
BAB III Pelalawan Pada Masa Kerajaan	20
3.1 Pelalawan Pada Masa Kerajaan Pekantua	20
3.2 Pelalawan Pada Masa Kerajaan Pelalawan	37

BAB IV Kabupaten Pelalawan	78
4.1 Sebelum Terbentuknya Kabupaten Pelalawan ...	78
4.2 Terbentuknya Kabupaten Pelalawan	102
BAB V Peninggalan Sejarah di Kabupaten Pelalawan	109
BAB VI Penutup	126
6.1 Kesimpulan	126
6.2 Rekomendasi	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 dengan pusat pemerintahan di Pangkalan Kerinci dan secara Administrasi Pemerintahan sampai tahun ini, Kabupaten Pelalawan dibagi atas 12 Kecamatan, 97 Desa dan 13 Kelurahan. Kabupaten Pelalawan terletak di sepanjang Sungai Kampar bagian Hilir dan terdapat pulau-pulau kecil yang merupakan wilayah strategis karena dekat dengan jalur pelayaran internasional yang paling ramai di dunia yaitu Selat Malaka, Perairan Johor dan Singapura.



Pusat Kota Pangkalan Kerinci, Ibukota Kabupaten Pelalawan

Wilayah Kabupaten Pelalawan sekarang ini, berawal dari Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380 M). Beliau adalah bekas Orang Besar Kerajaan Tumasik (Singapura) yang mendirikan kerajaan ini setelah Tumasik dikalahkan oleh Majapahit di penghujung abad XIV. Sedangkan Raja Tumasik terakhir yang bernama Permaisura (Prameswara) mengundurkan dirinya ke Tanah Semenanjung, dan mendirikan Kerajaan Melaka.

Sekitar tahun 1725 M, Kerajaan Pekantua Kampar berganti nama menjadi Kerajaan Pelalawan yang artinya tempat laluan atau tempat yang sudah dicadangkan, melalui sebuah upacara adat kerajaan. Sejak itu, maka nama Kerajaan Pekantua Kampar tidak dipakai orang, digantikan dengan nama Pelalawan sampai kerajaan itu berakhir tahun 1945. Kerajaan Pelalawan berakhir seiring dengan diproklamasikan Republik Indonesia tahun 1945. Raja Pelalawan menyatakan taat setia dan bersatu dalam Negara Republik Indonesia.

Kerajaan Pelalawan yang berpusat di Desa Pelalawan (sekarang) menyisakan beberapa peninggalan sejarah seperti senjata meriam dalam ukuran besar dan kecil.



Meriam di Desa Pelalawan

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, daerah Pelalawan merupakan daerah yang memiliki arti penting dalam sejarah. Seiring dibelakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mempengaruhi masyarakat untuk menulis sejarah dalam membangkitkan semangat pembangunan yang berhubungan erat dengan identitas daerah. Kebutuhan akan penulisan sejarah lokal sangat mendesak.¹

¹ Sejarah lokal (*local history*) adalah jenis sejarah yang secara spasial membahas peristiwa-peristiwa yang terbatas pada suatu daerah yang kecil, dari desa sam[pai tingkat propinsi. Karena skopenya yang kecil sering tidak menarik. Akan tetapi siapa tahu kalau di daerah sekecil itu terdapat kompleksitas peristiwa sejarah, dampaknya luas, dan mempunyai nilai kemanusiaan yang khas. Selain itu, terdapat pola kelakuan khas yang dapat dibandingkan dengan tempat lain.

Hal itu akan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan historiografi Indonesia dan sumbangan penting bagi kepentingan daerah. Sejarah lokal bertujuan menampilkan kekhasan suatu lokalitas seperti yang nampak pada ciri-ciri identitasnya. Identitas lokal itu dapat dipelajari melalui berbagai peristiwa yang dialami masyarakat lokal itu dan unsur-unsur budaya yang khusus terdapat dalam lokalitas yang bersangkutan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang yang memiliki wilayah kerja Kepulauan Riau, Riau, Jambi dan Bangka-Belitung pada tahun anggaran 2009 mengadakan penelitian yang berjudul : **Pelalawan : Dari Kerajaan Pekantua Ke Kabupaten Pelalawan.**

Tulisan tentang sejarah Pelalawan ini pernah ditulis oleh H. Tenas Effendy beserta tim dalam *Lintasan Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan)* yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tahun 2005. Tulisan ini akan melengkapi penulisan Sejarah Pelalawan yang pernah ada dengan pemaparan periodisasi² dalam perjalanan sejarah Pelalawan dan mengangkat potensi sejarah Pelalawan dengan bab tersendiri yaitu Peninggalan Sejarah Di Kabupaten Pelalawan.³

² Sejarah mengenal periode, yang dianggap merupakan suatu kesatuan tertentu, berdasarkan beberapa patokan yang telah ditentukan, baik secara konvensional dan umum diterima, maupun secara individual yaitu sesuai dengan sasaran perhatian sejarawan. Lihat dalam Taufik Abdullah, ed. Ilmu Sejarah dan Histografi Arah dan Perspektif (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hlm. xi.

³ Lihat Suhartono W. Pranoto. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2010. Hlm 65, Di dalam kajian sejarah sudah biasa dilakukan penulisan ulang (*rewriting history*). Hal ini terjadi karena penulisan merupakan dialog antara tulisan yang lama dan yang baru. Sejarah adalah interpretasi yang terus menerus tiada hentinya. Oleh

1.3 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran sejarah bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Agar tidak kehilangan identitas dan jati dirinya, maka masyarakat Pelalawan harus mengenal sejarah daerahnya. Masyarakat Pelalawan harus memiliki kebanggaan dengan daerahnya. Sehingga apabila mereka telah memiliki suatu kebanggaan. Maka, mereka akan mudah diarahkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang bernilai produktif. Terlebih lagi pada era globalisasi ini, generasi muda membutuhkan jatidirinya, bila tidak maka arus globalisasi akan menindas semua yang ada termasuk didalamnya kebanggaan akan sejarah dan kebudayaan daerahnya.

Pembangunan daerah Pelalawan telah dilakukan sejak lahirnya dan telah meninggalkan hasil sesuai dengan kondisi daerah dalam rentang waktu yang berkembang. Berbagai keberhasilan dan prestasi pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu tersebut, telah membawa berbagai terobosan dan lompatan kemajuan yang seringkali spektakuler, banyak terjadi dalam percepatan pembangunan, sehingga daerah Pelalawan masuk dalam salah satu daerah di Propinsi Riau yang dinilai berhasil dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan daerah Pelalawan.

karena itu, sejarah memerlukan penulisan ulang. Sumber sejarah tidak keluar sekali, tetapi ditemukan waktu lain. Demikian interpretasi terhadap suatu peristiwa berbeda-beda dan sangat tergantung dari subjektivitas sejarawan dan penelitiannya. Dalam dunia kesejarahan berlaku *write and rewrite*, tulis dan tulis ulang. Hal ini jelas memperkaya khasanah kesejarahan, perspektif, dan keluasan pandangan.

Diharapkan masyarakat Pelalawan memiliki suatu kebanggaan. Sehingga, mereka akan mudah diarahkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang bernilai produktif. Terlebih lagi pada era globalisasi ini, generasi muda membutuhkan jatid dirinya, bila tidak maka arus globalisasi akan menindas semua yang ada termasuk didalamnya kebanggaan akan sejarah dan kebudayaan daerahnya.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Suatu penulisan sejarah selalu dibatasi oleh dua batasan, yaitu batasan tempat dan batasan waktu. Batasan tempat yang diambil adalah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan batasan waktu yang diambil adalah berdirinya Kerajaan Pekantua (sebagai cikal bakal Pelalawan) yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380 M) yaitu sekitar abad 14 sampai dengan sekarang.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah suatu bentuk laporan penulisan sejarah sejak awal mula Pelalawan yang pada masa itu bernama Kerajaan Pekantua hingga menjadi sebuah kabupaten.

1.5 Metode

Metode yang digunakan dalam mengetahui asal-usul daerah Natuna ini adalah metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Untuk dapat memperoleh suatu penulisan sejarah yang dapat memberikan gambaran utuh, maka sumber sejarah diperoleh melalui :

- a. Studi pustaka, dengan jalan mencari dan mengumpulkan data-data melalui buku-buku cetak maupun dokumen yang semuanya berhubungan dengan permasalahan dan periode yang akan dikaji. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya diuji kebenaran historisnya.
- b. Wawancara dengan masyarakat sekitar melalui cerita rakyat yang berkembang di daerah ini berkenaan dengan asal-usul nama tempat di Kabupaten Pelalawan.

BAB II

ASAL USUL NAMA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

2.1 Pekantua

Pekantua adalah nama sebuah kerajaan yang didirikan oleh Maharaja Indera sekitar tahun 1380-1390 M. Maharaja Indera berasal dari Tumasik. Pusat kerajaan terletak di Bukit Hyang Pekantua Kampar (Sekarang termasuk Desa Kuala Tolam, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan). Sebagai pendiri Kerajaan Pekantua, Maharaja Indera membangun Candi Hyang di Bukit Tuo yang lazim disebut Bukit Hyang sebagai tanda bersyukur karena dapat membangun Pekantua menjadi kerajaan. Bekas-bekas kerajaan ini pernah ditemui di kawasan Desa Lubuk Mas berupa arca batu yang disebut Batu Bertapa, serta batu-batu bekas bangunan candi.

Setelah Maharaja wafat, beliau digantikan oleh puteranya Maharaja Pura dan terus berusaha mengembangkan Pekantua menjadi bandar besar di perairan Sungai Kampar. Hubungan dagang dengan Melaka semakin ditingkatkan pada masa pemerintahan Maharaja Laka.

Sehingga Pekantua dapat berkembang menjadi bandar yang besar. Pengganti Maharaja Laka yaitu Maharaja Syisya membangun bandar baru di seberang hulu bandar Pekantua yang dinamakan Bandar Nasi. Tempat itu kemudian lebih dikenal dengan Bandar Nasi-Nasi. Bandar Nasi-Nasi kemudian berkembang dengan pesat menjadi pusat perniagaan, sehingga terdapat dua bandar. Namun, bandar Pekantua tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

Selanjutnya, ketika Maharaja Jaya memerintah Pekantua menggantikan Maharaja Syisya, Pekantua diserang oleh Melaka yang menguasai kawasan perdagangan di Kampar. Sultan Melaka pada masa itu adalah Sultan Mansyur Syah. Beliau merebut Pekantua dan Bandar Nasi yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan besar di Kampar. Pekantua pada akhirnya jatuh ke tangan Malaka. Sedangkan Maharaja Jaya tewas dalam pertempuran perebutan kekuasaan itu.

Sultan Mansyur Syah Melaka kemudian mengangkat Raja Munawar Syah sebagai Raja Pekantua. Pada waktu itulah Raja Munawar Syah memproklamkan nama **Kerajaan Pekantua** diganti menjadi **Kerajaan Pekantua Kampar**. Selanjutnya, lambat laun Kerajaan Pekantua Kampar lebih dikenal sebagai **Kerajaan Kampar**.

Seiring dengan perjalanan waktu, pada masa pemerintahan Maharaja Dinda II (1720-1750 M), diperoleh kesepakatan untuk memindahkan pusat Kerajaan Kampar ke tempat yang oleh leluhurnya yaitu Maharaja Lela Utama pernah di "lalaukan" (artinya : ditandai atau dicadangkan) untuk menjadi pusat kerajaan yaitu di Sungai Rasau. Sungai

Rasau adalah salah satu anak sungai Kampar jauh di hilir Sungai Nilo).

Sekitar tahun 1725, dilakukan upacara pemindahan kerajaan dari Tanjung Negeri ke Sungai Rasau. Dalam upacara adat kerajaan itulah Maharaja Dinda II mengumumkan bahwa dengan kepindahan itu maka nama Kerajaan Pekantua Kampar diganti dengan nama **Kerajaan Pelalawan**. Sejak itu maka nama Kerajaan Pekantua tidak lagi digunakan sebagai nama penyebutan kerajaan. Dalam upacara adat tersebut, gelar Maharaja Dinda II disempurnakan menjadi Maharaja Dinda Perkasa atau disebut Maharaja Lela Dipati.

2.2 Pelalawan

Penyebutan asal usul atau istilah Pelalawan terdapat dari berbagai sumber, namun dari istilah-istilah tersebut ada yang berilham dari nama sungai, tempat, dan sebagainya. Namun hal tersebut dapat berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh H. Kern. Prof. Purbatjaraja, Prof. M. Yamin, tentang nama-nama kerajaan/raja berdasarkan dari nama flora dan fauna, serta sungai dan lain-lain.

Penamaan Pelalawan dari kata “lalau”, yaitu tempat yang dilalaukan di sungai Rasau. Karena pada waktu pemerintahan Maharaja Lela Utama ditemukan dua tempat untuk pusat pemerintahan, yaitu di sungai Rasau dan sungai Nilo. Yang dipilih adalah tempat di sungai Nilo, dan tempat sungai Rasau di “lalau”kan saja (Muchtar Lutfi, et-al, 1977 : 266).

Penulis Belanda bernama Vam Rijn Alkamede, telah menulis sebuah buku berjudul “Het reis naar Pulau Lawan” tahun 1887, dan sebelumnya yaitu pada tahun 1882 rekannya

telah pula menulis sebuah buku berjudul : “Het Rijk Van Pelalawan”. Buku baru yang ditulis tahun 1887 itu menjadi pertanyaan, mengapa nama negeri Sungai Rasau disebut Pulau Lawan. Hal ini dimaklumi, karena dalam administrasi Pemerintahan Hindia Belanda menulis Pelalawan yang dulunya diambil dari aksara Arab sehingga huruf “U” ditulis dengan huruf “Waw”.

Dalam logat Melayu East Kampar menurut budayawan Tenas Effendi, bahwa nama Pelalawan itu berasal dari kata kerja atau verb “lalau” yang berarti “mengharapkan sesuatu”, konotasinya sama dengan “tanah harapan”. Kata kerja tersebut mendapat awalan dan akhiran “pe dan an”, menjadi pelalauan. Terjadi perubahan bunyi dalam bacaan dan langsung terjadi perubahan aksara dari Pelalauan menjadi Pelalawan.

Pendapat lain menyatakan bahwa Pelalawan berasal dari nama dua sungai. Karena mulut sungai Selempeya dan mulut sungai Rasau itu terletak berhadapan, sehingga seolah-olah menunjukkan berlawanan dua mulut sungai. Sungai tersebut terletak di kawasan ujung Pantai dari lokasi istana Tuanku Tengku Besar Pahlawan pada abad ke 19, lalu diberikan julukan “Pulau Lawan”. Bila dipinjam dari logat Anak Dalam dari Rejang Lebong Bengkulu kata kerja “lalau”, artinya pergi jadi. Pelalauan itu diartikan adalah tempat bepergian. Dipinjam lagi menurut logat Bugis ada kata kerja “lawei” yang berarti “cegat”. Jadi Pelalawan adalah tempat pencegahan lalulintas barang dan penumpang serta kepentingan lainnya (Themasdoelhak Asseggaff, 6 April 1994).

BAB III

PELALAWAN PADA MASA KERAJAAN

3.1 Pelalawan Pada Masa Kerajaan Pekantua

Kerajaan Pekantua Kampar yang kemudian lebih dikenali dengan Kerajaan Kampar tumbuh sezaman dengan Kerajaan Sriwijaya dan Tulang Bawang (Lucas Tanjung, 1977 : 12). Kerajaan ini pernah memegang peranan penting di perairan Selat Sumatera yang kemudian dikenal dengan Selat Malaka. Pada waktu itu Kerajaan Kampar menonjol sebagai daerah yang ikut berkecimpung dalam arus perdagangan internasional, terlebih-lebih pada masa raja-raja di Melaka, Aceh dan Lingga-Riau.

Kerajaan Kampar dulunya merupakan daerah bawahan atau daerah di bawah kekuasaan raja Melaka. Kerajaan Melaka masa itu diperintahi Sultan Mahmud Syah I (1511-1528) yang merupakan Sultan terakhir Kesultanan Melayu Melaka dan dianggap sebagai Sultan pertama Kesultanan Melayu Johor-Riau, walaupun sebenarnya kekuasaannya meneruskan Kesultanan Melayu Melaka yang

telah memulai pemerintahannya semenjak akhir abad ke 15 (H. Ahmad Yusuf et-al, 1993 : 45). Pada waktu Melaka berperang melawan Portugis terjadilah peperangan yang dahsyat, dan telah beberapa kali terjadi kontak senjata antara armada perang Portugis dengan Melaka.

Pada bulan September 1511 Portugis di bawah pimpinan Alfonso d' Albuquerque mengirim serdadunya untuk menyerang pertahanan Melaka di Bertam, di tepi sungai Melaka. Akibat serangan ini Sultan Mahmud Syah dan puteranya Raja Ahmad mundur ke Muar dan mendirikan istana di Pagoh. Kubupun didirikan di Bentayan dekat Kuala Sungai Muar (haji Buyong Adil, 1980 : 5). Rupanya Portugis melancarkan peperangan ke pertahanan Sultan Mahmud Syah dan terjadilah peperangan tahun 1512. Angkatan laut Melayu dipimpin oleh Hang Nadim, sedangkan armada Portugis dipimpin oleh Fernao Peres de Audrade. Karena persenjataan antara pasukan Melayu dengan Portugis tidak seimbang, maka tentu dengan sendirinya pasukan Melayu akan gagal untuk memenangkan pertempuran laut ini. Nampaknya angkatan laut Kesultanan Melayu Johor Riau yang dipimpin oleh Hang Nadim tersebut terus terdesak dan tidak mampu menggempur pasukan angkatan laut Portugis. Bulan Juli 1512 Pagoh sebagai benteng pertahanan Kesultanan Melayu Johor-Riau ditaklukkan oleh Portugis.

Akibat peperangan tersebut Sultan Mahmud Syah beserta puteranya Raja Ahmad dan semua pembesar dan angkatan perangnya mengundurkan diri ke Pahang, namun tidak lama kemudian meneruskan perjuangan, yaitu pindah ke Bintan dan mendirikan istana di situ yaitu di Kopak, suatu

tempat yang dipilih Sultan Mahmud Syah karena letaknya sangat strategis sebagai basis pertahanan dan menyerang Portugis.

Semenjak kegagalan Sultan Mahmud Syah menyerang Melaka, Sultan Mahmud Syah tetap bersemayam di istana Kopak di Bintan sambil menyusun strategi dan merencanakan konsolidasi kekuatan angkatan perangnya. Sementara itu beberapa taktik non militer dipikirkan, misalnya menciptakan situasi rawan secara psikologis di Melaka, membiarkan para pembajak laut melakukan perampokan di Selat Melaka, dan melakukan blockade bahan makanan terhadap orang Portugis di Melaka.

Bagaimanapun keadaan Kerajaan Kampar pada waktu itu selama kurang lebih satu tahun kerajaan Melayu Johor-Riau tidak melakukan penyerangan. Tetapi Sultan Mahmud Syah mendengar bahwa telah terjadi hubungan antara kerajaan Kampar di bawah pemerintahan Sultan Abdullah dengan Portugis. Untuk itu Sultan Mahmud Syah melakukan intimidasi, karena dianggap sebagai musuh dalam selimut yang mau bekerjasama dengan Portugis.

Sebagai realisasi dari intimidasi yang dilakukan Sultan Mahmud Syah terhadap kerajaan Kampar, yakni melakukan suatu penyerangan. Rupanya penyerangan tersebut sempat diketahui oleh raja Abdullah, maka ia minta bantuan kepada Portugis. Pada tahun 1514 Sultan Mahmud Syah mengirinkan angkatan perangnya menyerang Kampar di bawah pimpinan Tun Biajid anak Laksamana Hang Tuah, pahlawan Melayu yang terkenal itu. Di Kampar kenyataannya bukanlah pasukan Kerajaan Kampar yang dihadapi

Kesultanan Melayu Johor-Riau melainkan pasukan Portugis yang dipimpin oleh George Batelho. Perang hebat terjadi di suatu tempat bernama Kerumutan. Dalam perang tersebut akhirnya pasukan Kesultanan Melayu Johor-Riau mundur melalui Kerajaan Indragiri kembali ke Bintan (H. Ahmad Yusuf, et-al, 1993 : 51).

Setelah berakhirnya peperangan tersebut, datang utusan Portugis ke Kampar untuk menjemput Raja Abdullah dan dibawa ke Melaka. Hal ini terjadi akibat hubungan baik antara Portugis dengan raja Abdullah. Oleh Portugis raja Abdullah diberi jabatan Bendahara di Melaka dan merupakan bendahara yang pertama di Melaka di bawah pemerintahan Portugis (Haji Buyong Adil, 1990 : 9). Hal ini membuat Sultan Mahmud Syah sangat marah, karena akibat pengangkatan tersebut dapat memberikan pengaruh psikologis terhadap eksistensi orang-orang Melayu di Kesultanan Melayu Johor-Riau dan juga di Melaka. Masyarakat akan mengikuti perintah-perintahnya, dan juga mengajak masyarakat Melayu untuk bekerjasama dengan Portugis.

Namun Sultan Mahmud Syah tidak tinggal diam, maka beliau mulai menjalankan politik propaganda, yakni membuat suatu pernyataan bahwa Raja Abdullah telah berjanji untuk menyerahkan Melaka dari Portugis kepada Sultan Mahmud Syah, dan Raja Abdullah telah berbuat serong kepada Gubernur Portugis George d' Albuquerque. Hal itu tentu membuat Gubernur Portugis sangat marah. Tanpa melakukan pemeriksaan, Gubernur Portugis memberikan ancaman hukuman pancung bagi Raja Abdullah. Walaupun pegawai-pegawai Portugis tidak menyetujui hukuman bunuh tersebut,

namun oleh Gubernur Portugis hukuman tetap dilakukan. Maka dilakukanlah hukuman tersebut, dan wafatlah Raja Abdullah (Sultan Kampar) dengan leher dipancung dihadapan orang banyak, dibunuh dengan cara tidak adil. Dengan kejadian tersebut Sultan Mahmud Syah puas. Sultan Mahmud Syah tersebut diceritakan dalam Sejarah Melayu sebagai sultan yang sangat keras, kejam dan pendendam. Tome Pires sebagai orang asing juga menceritakan sifat-sifat tidak terpuji Sultan Mahmud Syah ini.

Sejak itu Sultan Mahmud Syah menyusun konsolidasi kekuatan, dan Bintan sebagai basis kekuatan Sultan Mahmud Syah. Namun pada suatu ketika Bintanpun menjadi sasaran Portugis untuk diserang. Pada tahun 1526 Bintan dikalahkan Portugis, lalu Sultan Mahmud Syah berundur ke Kampar dan merajai di negeri itu karena raja Kampar yaitu raja Abdullah, putera saudara Sultan Mahmud Syah, telah ditawan oleh Portugis dan dibawa ke Melaka (A. Samad Ahmad, 1985 : x). rupanya Raja Abdullah tidak bernasib baik, ia wafat dipancung lehernya di tengah orang banyak.

Namun Sultan Mahmud Syah tidak lama di Kampar, karena ia berangkat ke Tanah Besar Negeri Johor. Portugis ternyata mengetahui kepergian Sultan Mahmud Syah. Bulan September 1527 Sultan Mahmud Syah kembali ke Kampar bersama-sama dengan anak isterinya serta orang-orang besar baginda. Di Kampar baginda bersemayam di istana asal yang dipunyai oleh saudara baginda almarhum Sultan Munawar Syah, Sultan Kerajaan Kampar, ayahanda Raja Abdullah yang telah dibunuh oleh Portugis di Melaka (Haji Buyong Adil, 1990 : 16).

Tiada lama setelah bersemayam di Kampar bersama isterinya Tun Fatimah, namun Tun Fatimah lebih dahulu mangkat daripada Sultan Mahmud. Sejak meninggalnya Tun Fatimah Sultan Mahmud Syah pun selalu tidak sehat. Tidak berapa lama kemudian pada tahun 1528 Sultan Mahmud Syah mangkat di Kampar, dan disebut dengan Marhum Kampar.

Sejak itulah Kampar tidak memiliki raja, dan pemerintahan dijalankan oleh para pembesar kerajaan kerajaan seperti Tun perkasa, Tun Hitam dan Tun Megat, dan barulah atas persetujuan Sultan Abdul Jalil Syah I mendudukkan Raja Abdurrahman Pembesar Kemaharajaan Melayu Johor sebagai raja di Kampar dengan gelar Maharaja Dinda I (1590-1630). Kurang lebih 60 tahun Kampar tidak diperintahi oleh seorang raja.

Kerajaan Kampar merupakan cikal bakal dari Kerajaan Pelalawan. Sejarah mencatat bahwa sebelum Pelalawan dikenal menjadi sebuah kerajaan, orang-orang lebih mengetahui kerajaan Kampar, dan ini banyak disebut-sebut dari berbagai sumber. Menurut Tengku-Tengku keturunan raja yang pernah bertahta di Kerajaan Pelalawan, memang pada sekitar abad ke 15 di daerah ini pernah ada kerajaan Kampar yang dikalahkan oleh pasukan Melaka (Lucas Tanjung, 1977 : 10).

Penyebab diserangnya kerajaan Kampar oleh Melaka karena Sultan Abdullah tidak mau menghadap Sultan Mahmud Syah sebagai Maharaja Melayu di Bintan, membuat Sultan Mahmud Syah murka dan memerintahkan pasukannya ke Kampar untuk menangkap Sultan Abdullah. Karena menurut tradisinya setiap Sultan yang baru diangkat harus

terlebih dahulu menghadap Sultan Melaka. Raja Abdullah merupakan pengganti dari Sultan Munawar Syah. Raja Abdullah atau Sultan Abdullah oleh Sultan Mahmud Syah I dikawinkan dengan anaknya, saudara raja Ahmad, setelah itu Sultan Abdullah ke Kampar. Kampar itu sendiri merupakan tujuan terakhir Sultan Mahmud Syah, yang sebelumnya dibangun oleh saudaranya Sultan Munawar Syah yang pada waktu itu sudah meninggal dunia (H. Ahmad Yusuf, et-al, 1993 : 56), dan di kerajaan Kampar Pekan Tua inilah wafatnya, sehingga dikenal dengan “Marhum Kampar”.

Disebutkan pula bahwa menurut *Sulalatus Salatin* bahwa kemunduran Kerajaan Kampar berawal karena tidak mau menyembah ke Melaka. Kerajaan Kampar pada waktu itu diperintahi Maharaja Wangsa Jaya nama rajanya dan Pekan Tua negerinya. Maka Sultan Mansyur Syah mentitahkan Seri Nara Diraja menyerang Kampar. Maka Seri Nara Diraja pun berlengkaplah. Setelah sudah lengkap maka Seri Nara Diraja pergilah bersama-sama dengan Sang Setia, dan Sang Naya dan segala hulubalang sekalian, Khoja Baba pun pergi mengiring Seri Nara Diraja (A. Samad Ahmad, 1986 : 148).

Menurut *Sulalatus Salatin* setelah pasukan Seri Nara Diraja sampai di Kampar, maka rakyat Kerajaan Kampar menyatakan kepada Maharaja Wangsa Jaya, bahwa orang-orang Melaka datang untuk menyerang Kampar. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh mata-mata raja Kampar, maka Maharaja Wangsa Jaya memberi perintah kepada Mangkubuminya, yakni “Tun Demang”, agar mengumpulkan rakyat untuk berperang melawan Melaka, dan semua rakyat dilengkapi dengan persenjataan perang. Seri

Nara Diraja datang menghadap, diikuti oleh orang-orang Melaka, terjadi perang, dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh seri Nara Diraja, dan akhirnya Maharaja Wangsa Diraja pun wafat.

Pada tahun 1530 roda pemerintahan Kerajaan Kampar dijalankan oleh para pembesar kerajaan. Hal ini dimaksudkan karena kerajaan Kampar yang berpusat di Pekan Tua yang terletak di sebelah hilir Pelalawan mengalami kemunduran semenjak Sultan Abdullah ditangkap, sehingga pemerintahan Kerajaan Kampar dilaksanakan oleh para pembesar kerajaan (Mughtar Lutfi, et-al, 1977 : 264). Kampar tidak memiliki raja sampai tahun 1590.

Adapun pembesar kerajaan yang pernah memerintah di Kerajaan Kampar adalah secara berturut-turut adalah Mangkubumi Tun Perkasa, Tun Hitam dan Tun Megat. Tun Hitam adalah putera dari Mangkubumi Tun Perkasa, sedangkan Tun Megat adalah putera dari Tun Hitam. Selama pemerintahan Mangkubumi Tun Perkasa dan Tun Hitam kerajaan Kampar tidak mengalami kemajuan yang berarti, dan ini dimaklumi pula karena raja yang memiliki kedaulatan penuh tidak ada, sehingga control terhadap roda pemerintahan tidak berjalan. Namun pada masa pemerintahan Mangkubumi (wakil raja) Tun Megat, hubungan yang selama ini boleh dikatakan terputus dilanjutkan kembali atas usul tiga pembesar kerajaan yakni :

1. Batin Muncak Rantau dari Nilo dan Napuh.
2. Patih Jambuano dari Delik dan Dayun.
3. Rajo Bilang Bungsu dari Tambak Segati.

Oleh Mangkubumi Tun Megat, ketiga pembesar kerajaan Kampar ini dikirim untuk menghadap Sultan Abdul Jalil Syah I raja Kemaharajaan Melayu di Johor. Adapun maksud kedatangan mereka bertiga adalah, sesuai dengan titah Mangkubumi Tun Megat agar Sultan Abdul Jalil Syah I mengangkat seorang raja untuk Kampar, sebab sejak Sultan Abdullah ditawan, maka Kampar tidak memiliki raja. Apalah artinya sebuah kerajaan tanpa mempunyai raja yang berdaulat, sebagai pengayom rakyat, tempat rakyat untuk bertanya, dan minta perlindungan.

Oleh Sultan Abdul Jalil Syah I permohonan Mangkubumi Tun Megat dengan perantaraan ketiga pembesar istana tersebut dikabulkan, dengan mengangkat raja Abdurrachman pembesar kerajaan Melayu di Johor menjadi raja di Kampar dengan gelar Maharaja Dinda I (1590-1630). Pada tahun 1590 Maharaja Dinda dengan restu Sultan Abdul Jalil Syah I untuk memangku Sultan di kerajaan Kampar berangkatlah dengan para pembesar kerajaan dan utusan Mangkubumi Tun Megat ke Pekan Tua, dan disambut hangat oleh Mangkubumi Tun Megat, dan resmilah Maharaja Dinda I menjadi Sultan kerajaan Kampar menggantikan Sultan Abdullah.

Adapun tugas dan program kerja Maharaja Dinda I di kerajaan Kampar adalah berusaha meningkatkan bidang perdagangan. Hal ini dimaklumi, bahwa Kampar terletak di tepi sungai, sehingga arus perdagangan dapat dilakukan melalui jalan laut. Namun kurang mendapat hasil seperti yang diharapkan, karena keadaan di laut banyak diganggu oleh bajak laut, di samping itu Pekan Tua sebagai ibukota kerajaan

Kampar kurang strategis sebagai Bandar perdagangan. Oleh karena itu Maharaja Dinda I memiliki gagasan yakni memindahkan ibukota kerajaan ke daerah lain, yang sangat mempertimbangkan akan letak dan jalur perdagangan, serta keamanan. Maka pada tahun kelima setelah memangku jabatan sebagai raja di kerajaan Kampar, tepatnya tahun 1595 ibukota kerajaan dipindahkan ke Bandar Tolam di sungai Kampar, lebih kurang 7 kilometer dari sebelah hilir Pekan Tua.

Kerajaan Kampar pada waktu Maharaja Lela Utama (1675-1686) memegang pemerintahan telah mengambil kebijaksanaan yakni dengan memindahkan lagi pusat kerajaan yakni ke sungai Nilo, dan sekaligus sebagai ibukota kerajaan. Dan merubah nama kerajaan dari Kampar menjadi kerajaan Tanjung Negeri. Memang selama ibukota pemerintahan kerajaan di Tanjung Negeri tersebut arus perdagangan cukup maju dan berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan dagang dengan Kuantan dan Siak, namun ibukota di Tanjung Negeri tersebut tidak berlangsung lama.

Kemudian sejak kerajaan dikendalikan oleh Maharaja Muda Lela (1691-1720), ia punya keinginan untuk memindahkan ibukota kerajaan ke daerah lain. Namun baru pada masa pemerintahan Maharaja Dinda II (1720-1750) ia memindahkan ibukota kerajaan ke Pelalawan. Hal ini disebabkan ibukota kerajaan diserang oleh bencana, yakni wabah penyakit, sehingga banyak menelan korban. Sejak itulah dikenal kerajaan Pelalawan, yang didirikan tahun 1725.

3.1.1 Silsilah Raja-Raja Kerajaan Pekantua Kampar

a. Sultan Munawar Syah (1511)

Sultan Munawar Syah adalah saudara dari Sultan Mahmud Syah I. setelah bulan Agustus 1511 pasukan Portugis dibawah pimpinan Alfonso d' Albuquerque dapat mengalahkan kerajaan Melayu Melaka, dengan demikian Melaka jatuh ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Syah I bersama-sama saudara-saudaranya mengundurkan diri ke hulu Bandar Melaka lalu berkumpul pula ditempat yang bernama Bertam, dan Sultan Mahmud berundur kembali ke tempat yang bernama Batu Hampar (Haji Buyong Adil, 1980:5). Sedangkan Sultan Munawar Syah mengundurkan diri ke Kampar dan menjadi raja di Kampar berpusat di Pekan Tua. Namun beliau tidak lama memerintah dan kemudian wafat di Kampar.

b. Sultan Abdullah (1511-1515)

Setelah Sultan Munawar Syah wafat, maka putera beliau raja Abdullah dinobatkan pengganti beliau menjadi Sultan Kampar kedua. Sultan Abdullah sebagai raja Kampar adalah kemanakan Sultan Mahmud Syah. Pernah Sultan Mahmud Syah ingin mencoba untuk membunuh Sultan Abdullah, namun akhirnya Sultan Abdullah melakukan kerjasama dengan Portugis, sehingga ia dilindungi oleh Portugis. Dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan Kampar Sultan Abdullah tidak mau tunduk kepada Sultan Mahmud Syah, mengakibatkan Sultan Mahmud Syah murka. Sultan Mahmud Syah melakukan penekanan terhadap Sultan Abdullah. Sebagai realisasi keinginan tersebut Sultan Mahmud Syah melakukan serangan, namun Sultan

Abdullah sudah mengetahui terlebih dahulu. Ia meminta bantuan Portugis dan akhirnya peperangan dimenangkan Sultan Abdullah. Armada perang Sultan Mahmud Syah terpaksa mengundurkan diri meninggalkan Kampar melalui Indragiri langsung ke Bintan. Sultan Abdullah oleh Portugis diangkat menjadi Bendahara di Melaka. Beliau adalah orang pertama sebagai Bendahara di Melaka di bawah Pemerintahan Portugis. Sultan Abdullah ini akhirnya wafat, sebagai akibat pernyataan Sultan Mahmud Syah kepada pemerintahan Portugis bahwa Sultan Abdullah akan menyerahkan Melaka kepada Sultan Mahmud Syah. Dia dihukum mati oleh Portugis dengan cara dipancung lehernya di depan khalayak ramai tahun 1515.

c. Orang Besar Kerajaan atau Mangkubumi (1515-1527)

Setelah Sultan Abdullah wafat, maka kerajaan Kampar tidak memiliki raja. Agar roda pemerintahan kerajaan berjalan, diangkatlah Orang Besar Kerajaan yakni sebagai Mangkubumi, untuk melanjutkan jalannya pemerintahan. Terputusnya pemerintahan kerajaan karena Sultan Abdullah tidak memiliki keturunan, dengan demikian kontinuitas warisan tidak dapat diteruskan. Makanya Orang Besar Kerajaan mengambil inisiatif menjalankan roda pemerintahan, sampai dengan diangkatnya raja baru.

d. Sultan Mahmud Syah (1527-1528)

Pada tahun 1526 Bintan sebagai basis kekuatan Sultan Mahmud Syah dikalahkan Portugis, maka Sultan Mahmud Syah beserta dengan keluarga dan Orang Besar Kerajaan

mengundurkan diri ke Johor. Kira-kira bulan September 1527 Sultan Mahmud Syah kembali bersemayam di Kampar bersama dengan anak isteri serta orang-orang besar baginda (Haji Buyong Adil, 1980 : 15). Baginda bersemayam di istana asal yang dipunyai oleh saudara baginda almarhum Sultan Munawar Syah. Pada tahun 1528 Sultan Mahmud Syah wafat, setelah melalui gering dan dimakamkan di Kampar dengan gelar Marhum Kampar. Untuk menjalankan roda pemerintahan diangkatlah putera beliau Sultan Muda untuk menjadi Sultan dengan gelar Sultan Alauddin Riayat Syah II.

e. Sultan Alauddin Riayat Syah II (1528-1530)

Pada tahun 1528 Sultan Alauddin Riayat Syah II dilantik menggantikan ayahnya Sultan Mahmud Syah Marhum Kampar. Sewaktu beliau memerintah, seluruh daerah jajahan Sultan Mahmud Syah takluk padanya. Sultan Alauddin Riayat Syah II ini disifatkan sebagai sultan Johor-Riau kedua. Sebagai pusat pemerintahan rupanya Kampar tidak strategis oleh karena terlalu jauh dari Selat Melaka dan Kepulauan Riau (Ahmad Yusuf, at-al, 1993 : 57). Berdasarkan pertimbangan itulah Sultan Alauddin Riayat Syah II bersama Bendahara PAduka Tuan Tun Isap Barakah dan semua Orang Besar Kerajaan berlayar meninggalkan Kampar menuju Pahang pada tahun 1529 untuk menemui saudaranya. Di Pahang Sultan Alauddin Riayat Syah II dikawinkan dengan saudara Sultan Mahmud Syah (Sultan Pahang V) Sultan Mahmud Syah Sultan Pahang adalah saudara sepupu dan juga sebagai menantu dari Sultan Mahmud Syah II Marhum Kampar, Sultan Mahmud Pahang kawin dengan Raja Khatijah Marhum Kampar (Haji Buyong Adil, 1980 : 17).

Dalam perjalanan Sultan Alauddin Riayat Syah II ke negeri Pahang juga didampingi oleh laksamana laut yakni Hang Nadim, dan perjalanan itu menggunakan perahu, lengkap dengan segala menteri, hulu balang, bentara, sida-sida, bala tentara sekalian (A. Samad Ahmad, 1986 : 289). Dengan demikian sejak akhir tahun 1529 kerajaan Kampar tidak memiliki raja yang menjalankan roda pemerintahan. Akhirnya Sultan Alauddin Riayat Syah II menjadi sultan Johor-Riau, sebagai sultan kedua.

f. Orang-Orang Besar Kerajaan (1530-1590)

Sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Syah II, maka Kampar diperintahi oleh para Orang-Orang Besar Kerajaan (Mangkubumi), diantaranya secara berturut-turut adalah Mangkubumi Tun Perkasa, Tun Hitam, dan Tun Megat. Tun Hitam adalah putera dari Mangkubumi Tun Perkasa, sedangkan Tun Megat adalah putera dari Tun Hitam. Masa pemerintahan Mangkubumi Tun Perkasa dan Tun Hitam kerajaan Kampar tidak mengalami kemajuan yang berarti, baik masalah ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Pada masa roda pemerintahan dipegang oleh Tun Megat, salah satu kemajuannya adalah melakukan kembali hubungan dengan Kemaharajaan Melayu Johor-Riau. Selama kakek dan ayahandanya sebagai pemangku raja di Kampar, hubungan dengan kerajaan Melayu Johor-Riau seolah-olah terputus. Atas usul tiga pembesar kerajaan, yaitu : Batin Muncak Rantau dari Nilo dan Napuh, Patih Jambuano dari Delik dan Nayun, serta Rajo Bilang Bungsu dari Tambak Segati, hubungan yang selama ini terputus disambung kembali.

Tun Megat mengutus ketiga pembesar ini untuk menghubungi Sultan Melayu Johor-Riau yang pada waktu itu diperintahi oleh Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Syah II (1571-1597). Utusan ketiga pembesar kerajaan Kampar tersebut adalah untuk bermohon kepada Sultan agar diangkat seorang raja di Kampar, karena Kampar waktu itu tidak memiliki raja. Permohonan tersebut disetujui oleh Sultan Ali Jalla Abdul Jalil II mengingat Kampar sudah mempunyai hubungan baik dengan Kerajaan Melayu Johor-Riau.

Sultan Abdul Jalil I mengangkat Raja Abdurrachman Pembesar Kemaharajaan Melayu Johor-Riau menjadi raja di Kampar dengan gelar Maharaja Dinda I. kurang lebih 60 tahun Kampar tidak langsung diperintahi raja, tetapi oleh pembesar kerajaan.

g. Raja Abdurrachman gelar Maharaja Dinda I (1590-1630).

Pada tahun 1590, Maharaja Dinda I pergi ke Pekan Tua yang merupakan pusat ibukota Kerajaan Kampa. Setibanya di Pekantua, beliau disambut oleh Mangkubumi Tun Megat. Tun Megat diangkat Maharaja Dinda I sebagai Orang Besar Kerajaan. Kegiatan utama yang dilakukan Maharaja Dinda I adalah meningkatkan perdagangan, namun usaha ini kurang berhasil, karena untuk melakukan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lainnya sering diganggu oleh bajak laut. Di samping itu dari letak geografis, Pekan Tua sebagai pusat kerajaan tidak strategis sebagai bandar perdagangan. Pada tahun 1595 atas beberapa pertimbangan, ibukota kerajaan dipindahkan ke Bandar Tolam di Sungai

Kampar, yang terletak lebih kurang 7 km di sebelah hilir Pekan Tua. Pemandahan dari Pekan Tua ke Bandar Tolam sangat tepat, karena letak Bandar Tolam sangat strategis sebagai Bandar perdagangan, dan terletak pada jalur lalu lintas perdagangan di Sungai Kampar. Bandar Tolam dapat menampung seluruh hasil dari daerah hulu sungai Tolam dan sekitarnya seperti dari daerah Pangkalan Bunut. Setelah Bandar Tolam dijadikan ibukota kerajaan dan pusat perdagangan, maka keadaan pemerintahan dan perekonomian semakin baik.

Pemerintahan Maharaja Dinda I berlangsung selama 40 tahun. Selama pemerintahan beliau banyak kemajuan yang dicapai kerajaan Kampar. Pada tahun 1630 beliau digantikan oleh puteranya Maharaja Lela I.

h. Maharaja Lela I (1630-1650)

Usaha Maharaja Dinda I untuk memajukan bidang perdagangan oleh Maharaja Lela I terus ditingkatkan. Upaya yang dilakukan beliau adalah membuat pangkalan perdagangan di Telawa Kandis. Namun ternyata kebijakan yang dilakukan oleh Maharaja Lela tidak berhasil, karena perdagangan di Telawa Kandis tersebut bukan bertambah baik, tetapi sebaliknya bertambah mundur. Beliau digantikan oleh Maharaja Dinda Bangsawan.

i. Maharaja Dinda Bangsawan (1650-1675)

Maharaja Lela I digantikan oleh Maharaja Dinda Bangsawan, beliau meneruskan pemerintahan sebelumnya. Kondisi sosial, ekonomi dan politik pada masa pemerintahan

Maharaja Dinda Bangsawan belum banyak diketahui dengan pasti, tetapi beliau memerintah cukup lama kira-kira 25 tahun.

j. Maharaja Lela Utama (1675-1686)

Maharaja Dinda Bangsawan digantikan oleh Maharaja Lela Utama. Pada masa pemerintahan beliau, terjadi lagi pemindahan pusat pemerintahan ke Sungai Nilo dan kerajaan bernama Tanjung Negeri. Setelah pusat pemerintahan di Tanjung Negeri perekonomian semakin baik. Pada masa pemerintahannya terjalin hubungan dagang antara Tanjung Negeri dengan Kuantan dan Siak. Pemerintahan Maharaja Lela Utama di Tanjung Negeri tidak berlangsung lama. Beliau digantikan oleh puteranya Maharaja Wangsa Jaya. Sejak masa pemerintahan Maharaja Lela Utama itu pula nama Kampar tidak terdengar lagi.

k. Maharaja wangsa Jaya (1686-1691)

Setelah Maharaja Wangsa Jaya diangkat sebagai raja, beliau meneruskan pemerintahan ayahandanya di Tanjung Negeri, dan hubungan dagang dengan daerah-daerah lainnya diperluas. Adiknya diangkat sebagai Raja Muda dan setelah beliau wafat menggantikannya sebagai raja.

l. Maharaja Muda Lela (1691-1720)

Maharaja Muda Lela meneruskan pemerintahan saudaranya, dan memajukan hubungan dagang dengan daerah lain, sebagaimana telah dilakukan oleh para pendahulunya. Beliau digantikan oleh puteranya bernama Maharaja Dinda II. Beliau inilah yang memindahkan pusat pemerintahan

dari Tanjung Negeri ke Pelalawan, yang merupakan Raja Pelalawan pertama.

3.2 Pelalawan Pada Masa Kerajaan Pelalawan

3.2.1 Munculnya Kerajaan Pelalawan

Maharaja Wangsa Jaya mangkat dan pemerintahan dipegang oleh adiknya dengan gelar Maharaja Muda Lela (1691-1720), namun pemerintahannya tidak begitu lama, beliau digantikan oleh puteranya Maharaja Dinda II (1720-1750). Pada masa ini mulai dikenal dengan Kerajaan Pelalawan. Kerajaan Pelalawan yang muncul didirikan oleh Abdurrachman Datuk Maharaja Dinda dan panglimanya Datuk sinda (Themasdoelhak Asseggaff, 6 April 1994).

Maharaja Dinda II membangun Kerajaan Pelalawan yang diperkirakan pada tahun 1725. Pada awalnya negeri ini dipusatkan di sungai Rasau, sekarang disebut Kampung Dalam Sungai (Mughtar Lutfi, et-al, 1977 : 266). Kerajaan Pelalawan muncul sebagai pengganti Kerajaan Pekantua Kampar (Anwar Syair, 1982 : 98).

Timbulnya Kerajaan Pelalawan tidak terlepas dari terjadinya perebutan kekuasaan di Johor. Kerajaan Johor sebagai kelanjutan Kerajaan Melaka tergeser oleh pendudukan Portugis di kota Melaka (Sartono Kartodordjo, 1987 : 252). Di samping berkali-kali terjadinya serangan-serangan Portugis dan Aceh, juga intervensi kekuasaan kerajaan oleh unsur-unsur non Melayu, khususnya suku Bugis. Ditambah lagi dengan kota-kota pelabuhan yang dikuasai oleh golongan Orang Kaya yang besar pengaruhnya.

Maharaja Dinda II memutuskan segala

hubungannya dengan Kemaharajaan Melayu Johor. Johor pada waktu itu dikuasai oleh Datuk Bendahara Tun Habib dan bergelar Sultan Abdul Jalil. Kehendak Mahara-
raja Dinda II untuk memisahkan diri dari kekuasaan
Kemaharajaan Melayu Johor tidak mendapat perhatian
serius dari Sultan Abdul Jalil, sehingga Pelalawan menjadi
sebuah kerajaan yang berdiri sendiri, tanpa ikatan politik
dengan Kemaharajaan Melayu Johor.

Wafatnya Sultan Mahmud Syah II sebagai Sultan
Kemaharajaan Melayu Johor Riau, banyak menimbulkan
kemelut, sebab Sultan Mahmud Syah II tidak mempunyai
ahli waris yang akan menggantikan kedudukannya sebagai
sultan. Dia tidak mempunyai putera, dengan demikian zuriat-
zuriat sultan-sultan Melaka tidak bersambung lagi, terputus
setelah memerintah negeri Melayu selama 299 tahun (1400-
1699).

Sepeninggal Sultan Mahmud Syah II yang menjadi
sultan adalah keturunan Bendahara Sri Maharaja Tun Habib
Abdul Jalil yang telah memangku jabatan Bendahara
Kesultanan Melayu Johor-Riau semenjak ayahnya meninggal
pada tahun 1697. Dengan pupusnya zuriat-zuriat sultan-sul-
tan Kesultanan Melayu Melaka dan naiknya dinasti Bendahara
menjadi sultan, menyebabkan kesetiaan Orang Laut sebagai
inti angkatan laut Kesultanan Melayu Johor-Riau menjadi
berkurang dan akhirnya pada waktu Raja Kecil merebut tahta,
kesetiaan Orang Laut berpindah kepada Raja Kecil. Raja Kecil
menuntut tahta karena ia adalah putera Sultan Mahmud Syah
II, menyebabkan terpecah belahnya orang Melayu. Dengan
terpecah belahnya orang Melayu masuklah orang Bugis
yang berjasa mengusir Raja Kecil, dengan menuntut

imbalan politis yang besar yaitu sebagai Yang Dipertuan Muda.

Tentang siapa sebenarnya Raja Kecil tersebut terdapat beberapa versi. Ada versi yang mengatakan bahwa Sultan Mahmud Syah II memiliki isteri lain yang bernama Encik Pung. Pada waktu terjadi kudeta di Kesultanan Melayu Johor Riau terhadap Sultan Mahmud Syah II oleh Bendahara. Sultan Mahmud Syah II wafat dan isterinya yang kebetulan sedang hamil diselamatkan oleh hulubalangnya ke Jawa diperkirakan di Banten. Kemudian dibawa lagi oleh ibunya ke Palembang, Jambi, Indragiri dan selanjutnya ke Pagaruyung (Suwardi Muhammad Samin, 1970 : 12).

Di Pagaruyung inilah Raja Kecil dididik dan dibesarkan dan setelah beliau dewasa, maka keinginannya untuk menjadi raja menggantikan ayahnya sangat besar. Maka berangkatlah beliau menuju Johor untuk merebut tahta kerajaan dari tangan Datuk Bendahara yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV (1699-1718) di dalam perjalanan tersebut Raja Kecil diiringi oleh 4 orang Datuk-Datuk sebagai penasehat dan seorang penjawat khusus serta beberapa hulubalang. Kemudian beliau dibantu oleh para batin-batin di Bengkalis, dan melakukan kerjasama dengan orang-orang yang tidak senang kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Dalam pendaratan pertama di Pangkalan Rama, Raja Kecil dapat mengalahkan pasukan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV dan akhirnya beliau mengangkat diri sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1718-1722).

Dari peristiwa yang terjadi di Kesultanan Melayu Johor tersebutlah yang mendorong keinginan Maharaja Dinda II untuk melepaskan diri dari Johor-Riau. Maha-

raja Dinda II sudah mempelajari situasi dan kondisi yang terjadi dan akan terjadi di Kesultanan Melayu Johor Riau, dan daerah-daerah lainnya pun secara berangsur melepaskan diri dari Kesultanan Melayu Johor-Riau.

Keinginan Maharaja Dinda II tersebut sudah nampak untuk memisahkan diri tersebut, sejak dari penobatannya sebagai sultan yang memerintah di Tanjung Negeri. Daerah ini dibangun dan menjadi ibukota pemerintahan sejak datuknya Maharaja Lela Utama, dan pada masa pemerintahan Maharaja Dinda II inilah resmi Kerajaan Pelalawan menjadi pusat pemerintahan, dan sekaligus berdiri sendiri. Kerajaan Pelalawan menjadi kerajaan yang berdaulat tanpa tekanan dari Kesultanan Melayu Johor-Riau.



Jalan Menuju Desa Pelalawan, Bekas Kerajaan Pelalawan

3.2.2 Sistem Pemerintahan Pelalawan Pada Masa Kerajaan Pelalawan

Untuk menjalankan roda pemerintahan di seluruh kerajaannya, raja dibantu oleh para pejabat atau Orang Besar kerajaan yang secara hierarkis menduduki fungsi tertentu dalam birokrasi kerajaan. Sebagai pusat pemegang kekuasaan adalah raja, yang dalam mengambil kebijaksanaan dalam pemerintahan didampingi oleh para Datuk-Datuk, yang juga disebut dengan “Dewan Kerajaan”.

Tugas pokok dari para Datuk-Datuk (Dewan Kerajaan) ini adalah memberi nasehat dan pertimbangan kepada raja dalam memecahkan masalah-masalah yang sulit yang dihadapi oleh pemerintah Kerajaan Pelalawan. Para Datuk-datuk juga ikut bertanggung jawab terhadap penyusunan undang-undang kerajaan. Para Datuk-Datuk tersebut juga diberi tugas untuk mengurus hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Mereka sekaligus berfungsi sebagai Dewan Keluarga kerajaan.

Dalam menjalankan pemerintahan Maharaja dibantu oleh Datuk Muda yang dalam kegiatan sehari-hari ia merupakan pembantu atau wakil raja. Kedudukannya sedikit lebih rendah dari Maharaja, dan merupakan orang kepercayaan Raja, baik untuk urusan keluar maupun ke dalam.

Semenjak Sultan Abdullah tinggal di Melaka dijadikan Bendahara Melaka oleh Portugis, maka operasional pemerintahan dijalankan oleh para mangkubumi atau pembesar Kerajaan Kampar, seperti Mangkubumi Tun Perkasa, Tun Hitam dan Tun Megat. Seharusnya sepeninggal Raja Abdullah tentu ada raja penggantinya

untuk menjalankan roda pemerintahan, namun karena keturunannya tidak ada, maka Orang Besar Kerajaan di ataslah yang menjalankan pemerintahan.

Raja menduduki posisi pusat, namun di dalam pelaksanaan kekuasaannya ia dibatasi oleh sebuah Dewan Mahkota, yang terdiri dari para Datuk-Datuk dan beranggotakan pula para bangsawan dan keluarga dekat raja. Mereka inilah sebagai penasehat raja dan memecahkan persoalan-persoalan penting seperti soal pemerintahan, penggantian tahta (Hal ini dapat dilihat pada proses penobatan Maharaja Lela menggantikan Maharaja Sinda II). Peranan Datuk Bintara Dalam dan Datuk Pebilangan dalam proses penggantian tahta tersebut kelihatan sekali, demikian pula peranan raja dalam menyampaikan pengumuman perang dan damai, hubungan dengan kekuasaan luar dan sebagainya.

Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Pelalawan, raja mempunyai kekuasaan untuk mengangkat, memindahkan ataupun memecat pejabat-pejabat kerajaan, demikian pula untuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang. Dalam pengangkatan pembantu raja, kekuasaan raja cukup berperan. Misalnya pada waktu Kerajaan Pelalawan diperintahi oleh Assyaidis Syarif Jaafar Abdurakhman Fakhruddin Tengku Besar Raja Kerajaan Pelalawan (1866-1872), beliau mengangkat seorang Orang Besar Kerajaan Pelalawan bergelar Datuk Kampar Samar Diraja Haji Mohammad Basir. Dengan demikian sudah terdapat empat gelar Orang Besar Kerajaan Pelalawan, masing-masing : Datuk Tengku Raja Lela Putera, Datuk Bandar Setia Diraja, Datuk Laksamana Mangku Diraja, dan Datuk Kampar Samar Diraja.

Demikian pula di dalam pemberian hukuman terhadap pengkhianat kerajaan, misalnya menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Monti Lela yang merupakan orang kepercayaan Kerajaan Siak untuk memata-matai situasi dan kondisi, serta persiapan perang Kerajaan Pelalawan. Dengan tugas mata-mata inilah Kerajaan Siak dapat mengetahui peta kekuatan Kerajaan Pelalawan.

Namun untuk mengangkat pejabat kerajaan tingkat atas, artinya sebagai penasihat sultan atau raja, maka raja meminta nasehat pada Dewan kerajaan. Pengangkatan tersebut didasarkan atas sejauh mana jasa dan kecakapan seseorang. Pengangkatan seseorang pada jabatan yang lebih tinggi biasanya secara langsung diberikan gelar. Demikian pula raja dapat saja mengangkat orang-orang berjasa sebagai bangsawan.

Dalam sistem penggantian raja di Kerajaan Pelalawan biasanya pengganti raja adalah putra mahkota yang diangkat dari putra sulung raja. Akan terjadi permasalahan yang timbul di dalam istana, apabila di antara keluarga raja memiliki perbedaan pendirian dalam penunjukan penggantian seorang raja. Permasalahan tersebut dapat berakibat tertundanya keberangkatan ke tempat terakhir seorang raja yang sudah mangkat, karena menurut kebiasaan jenazah raja baru dapat diberangkatkan ke makam apabila sudah ada kepastian mengenai penunjukan penggantinya. Namun sejak masa pemerintahan kerajaan Kampar dan sampai dengan masa kerajaan Pelalawan tidak pernah terjadi kericuhan maupun perselisihan dalam pengangkatan seseorang untuk pengganti raja. Dengan demikian semangat demokrasi sudah tertanam di dalam sistem pemerintahan

di kerajaan Pelalawan.

Dalam penggantian raja sering pula terjadi berhubung putra mahkota belum dewasa, maka dibentuk dewan perwalian yang terdiri dari para Orang Besar Kerajaan. Penggantian raja yang meninggal dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun pemegang kekuasaan baik yang tetap maupun untuk sementara selalu terdiri dari bangsawan keluarga dekat raja (Sartono Kartidirdjo, 1975 : 43). Namun ada juga dalam pengangkatan tersebut ikut campur pula pemerintah Hindia Belanda.

Hal ini juga terjadi pada Kerajaan Pelalawan, yaitu sewaktu Sultan Hasyim sudah sakit-sakitan dan wafat tahun 1930. Beliau meninggalkan seorang putra yang masih kecil bernama Tengku Said Harun gelar Tengku Sulung Negara, yang dikirim oleh ayahandanya ke Siak untuk belajar. Untuk menjalankan roda pemerintahan kerajaan atas mufakat Dewan Kerajaan dan dengan persetujuan Pemerintahan Hindia Belanda, diangkatlah seorang pemangku raja dengan gelar Regent van Pelalawan yaitu Tengku Said Usman bin Ubaidillah dan dikenal pula dengan sebutan Tengku Pangeran. Kurang lebih 10 tahun sebagai pemangku raja Pelalawan, dan Tengku Said Harun pun sudah dewasa, maka pada tanggal 24 Januari 1940 Tengku Said Harun Putera Sulung Negara dinobatkan sebagai raja kerajaan Pelalawan dengan gelar Assaidis Syarif Harun bin Hasyim Fakhruddin Tengku Besar Raja Kerajaan Pelalawan, dan merupakan raja terakhir Kerajaan Pelalawan (1940-1945).

3.2.3 Struktur Pemerintahan Pelalawan Pada Masa Kerajaan Pelalawan

Dalam urusan pemerintahan Kerajaan Pelalawan, raja dibantu oleh seorang mangkubumi, yang dalam kerajaan Pelalawan disebut Datuk Muda, yang sehari-hari dapat bertindak sebagai wakil sultan atau raja dalam melaksanakan roda pemerintahan. Pada umumnya, jabatan ini dipegang oleh seorang bangsawan keluarga dekat dengan raja, seperti putra mahkota yang secara langsung dapat dinobatkan menjadi raja jika ayahandanya mangkat atau diambil dari saudara raja itu sendiri.

Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Pelalawan kita mengenal beberapa hirarkis yang masing-masing memiliki *policy* dan wewenang yang berbeda dan dalam gerak pelaksanaannya masing-masing bertanggung jawab kepada raja. Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Pelalawan kita mengenal beberapa struktur yang penting, diantaranya adalah :

1. Sultan atau Raja

Kedudukan Sultan atau Raja adalah sebagai penguasa tertinggi dalam bidang pemerintahan. Penggantian Sultan didasarkan atas keturunan, dan penggantian itu tidak boleh dipindahkan ke dinasti lain selama masih ada keturunan sultan sebelumnya. Misalnya pernah dinobatkan sebagai raja dari pembesar Kerajaan Johor Abdurakhman, yang diangkat sebagai raja di Kerajaan Kampar karena keturunan raja Abdullah tidak ada. Pengangkatan Sultan atau raja itu sendiri diangkat dan dinobatkan setelah mendapat persetujuan

dari pembesar-pembesar kerajaan (Dewan Istana).

2. Datuk Bintara

Adalah pembantu sultan yang bertugas melayani dan menyampaikan segala titah raja atau membawa alat-alat kebesaran kerajaan.

Datuk Bintara dibagi atas :

- a. Bintara Dalam, abdi dalem, artinya jabatan datuk yang bertugas hanya berkisar di dalam istana.
- b. Bintara Kanan, Datuk Bintara yang bertugas antara lain menyampaikan persembahan rakyat kepada raja, artinya apabila ada rakyat yang ingin mempersembahkan sesuatu pada raja, maka Datuk Bintara Kanan inilah terlebih dahulu menginformasikan kepada raja.
- c. Bintara Kiri, Datuk Bintara yang bertugas antara lain menyebutkan nama orang yang ingin menghadap raja. Jadi apabila ada seseorang yang ingin menghadap raja, maka Datuk Bintara Kiri ini menanyakan nama penghadap, dan barulah diinformasikan kepada raja. Apabila raja atau sultan berkenan, maka diperintahkan kepada Bintara Kiri untuk mempersilakan rakyat tersebut untuk menghadap raja.

3. Panglima

Panglima pada Kerajaan Pelalawan di sini adalah pemimpin pasukan, atau pemimpin kesatuan tentara. Panglima perang kerajaan Pelalawan yang pernah memimpin perang dengan kerajaan Siak adalah Panglima Katan, dan

dibawah kedudukannya adalagi Panglima Muda yang bernama Kudin.

4. Laksamana

Laksamana di Kerajaan Pelalawan ini adalah kepala angkatan laut atau panglima angkatan laut. Laksamana ini memiliki wewenang mengamankan kerajaan bila diserang oleh musuh dari laut. Laksamana Kerajaan Pelalawan yang sangat terkenal dalam perang Siak dengan Pelalawan adalah Datuk Laksamana Sri Amar Wangsa, atau dikenal juga dengan Laksamana Sangar. Namun sebelumnya dikenal Laksamana Batin Hitam yang bersama-sama dengan Panglima Katan saling membantu dalam mempertahankan Kerajaan Pelalawan dari serangan kerajaan Siak Sri Indrapura. Datuk Batin Hitam adalah ayahanda dari Sri Amar Wangsa.

5. Datuk-Datuk

Datuk-Datuk di Kerajaan Pelalawan adalah gelar kehormatan bagi orang yang dituakan. Biasanya mereka diberikan jabatan oleh sultan untuk menangani suatu urusan kerajaan. Gelar Datuk tersebut memiliki derajat dan martabat yang tinggi dan pengangkatan Datuk-Datuk tersebut langsung oleh sultan, setelah melakukan musyawarah dengan Orang Besar Kerajaan (Dewan Kerajaan).

6. Batin

Batin pada Kerajaan Pelalawan adalah penghulu adapt atau orang yang diberi kepercayaan oleh raja untuk mengepalai sebuah negeri. Misalnya Batin Muncak dari Nilo dan

Napuh, Batin Delik, Batin Dayun dan sebagainya.

7. Datuk Pebilangan

Merupakan orang yang mengetahui secara mendalam tentang silsilah kerajaan. Pada waktu kerajaan melakukan musyawarah dalam penggantian sultan, maka Datuk Pebilangan inilah akan mengungkapkan kejadian-kejadian masa silam kerajaan. Ungkapan-ungkapan tersebut dilantunkan melalui pepatah petitih tentang bagaimana kebesaran, kejayaan dan kesaktian raja-raja sebelumnya.

8. Tunggal Manah

Tunggal Manah di Kerajaan Pelalawan ini adalah orang-orang yang disebut dengan para cerdik pandai dan alim ulama.

Kerajaan Pelalawan sewaktu pemerintahan Sultan Hamid telah terjadi perubahan struktur pemerintahan dengan diangkatnya Orang Besar Kerajaan yang bergelar Datuk Laksamana Mangku Diraja, yang bertugas sebagai panglima armada kerajaan Pelalawan, dan adiknya Sayed Jaafar diangkat sebagai Tengku Panglima Besar kerajaan Pelalawan.

Sewaktu Kerajaan Pelalawan diperintahi Sultan Jaafar beliau menambah lagi satu Orang Besar Kerajaan yang bergelar Datuk Kampar Samar Diraja Haji Mohammad Basir. Jadi ada empat Orang Besar Kerajaan yakni :

1. Datuk Tengku Raja Lela Putra
2. Datuk Bandar Setia Diraja
3. Datuk Laksamana Mangku Diraja
4. Datuk Kampar Samar Diraja.

Pada masa pemerintahan Sultan Hasyim Orang Besar Kerajaan dikurangi, yakni Datuk Bandar Setia Diraja diturunkan kedudukannya menjadi Bintara. Sehingga struktur pemerintahan kerajaan menjadi tiga Orang Besar Kerajaan, yakni :

1. Datuk Tengku Raja Lela Putra
2. Datuk Laksamana Mangku Diraja
3. Datuk Kampar Samar Diraja

3.2.4 Silsilah Raja-Raja Kerajaan Pelalawan

a. M. Maharaja Dinda II (1720-1750)

Maharaja Dinda II memindahkan ibukota dari Tanjung Negeri ke Pelalawan tahun 1725, setelah hampir lima tahun memerintah. Dasar pertimbangan pemindahan tersebut adalah ibukota kerajaan diserang oleh suatu wabah penyakit, sehingga membawa korban yang tidak terhitung. Oleh sebab itu ibukota kerajaan memerlukan tempat yang aman dan strategis.

Maharaja Dinda II kemudian memutuskan hubungan dengan Kemaharajaan Melayu Johor-Riau, sejak terjadinya perebutan kekuasaan. Dalam peristiwa Sultan Mahmud Syah II dibunuh oleh Laksamana Megat Seri Rama, dan Kemaharajaan Melayu Johor-Riau diperintah oleh Datuk Bendahara Tun Habib, yang setelah diangkat sebagai sultan bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Sultan Melayu Johor-Riau ini tidak menghiraukan atas pemisahan tersebut, apalagi Pelalawan baru dipersiapkan sebagai kerajaan.

b. Maharaja Bungsu (1750-1780)

Setelah Maharaja Dinda wafat, beliau digantikan oleh puteranya yang bernama Maharaja Bungsu. Beliau menyusun Kerajaan Pelalawan menjadi sebuah kerajaan besar, yaitu meluaskan daerah kekuasaannya sampai jauh ke daerah Petalangan. Maharaja Bungsu juga meningkatkan hubungan perdagangan dengan Kuantan dan XIII Koto Kampar, dan memutuskan arus perdagangan dengan Selat Melaka. Pentingnya Selat Melaka sebagai tempat pertemuan kapal di persimpangan alur pelayaran dari barat, timur, selatan dan utara telah dikenal berabad-abad lamanya (AB. Lopian, 1988 : 199). Namun putusnya hubungan arus dagang dengan Selat Melaka disebabkan sering terjadi keributan, dan juga kurang aman dari para pembajak-pembajak laut.

Pada masa pemerintahan Maharaja Bungsu, beliau mengangkat Orang Besar Kerajaan, yaitu Datuk di Sanggar dengan gelar Sri Amar Wangsa atau Raja Laut Perkasa, yang bertanggung jawab untuk mengamankan perdagangan dari persaingan dengan Kemaharajaan Melayu Johor-Riau, karena hubungan pemerintahan sudah tidak ada lagi. Kemudian beliau meningkatkan perdagangan hasil hutan yang didatangkan dari Petalangan Napuh dan Bunut. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh puteranya bernama Maharaja Sinda II.

c. Maharaja Sinda II (1780-1810)

Maharaja Sinda II diangkat sebagai raja Kerajaan Pelalawan untuk menggantikan ayahandanya Maharaja Bungsu. Kerajaan Pelalawan pada masa pemerintahan Maharaja Sinda II pernah diserang oleh Kerajaan Siak Sri

Indrapura yang pada masa itu diperintah oleh Sultan Assiadis Syarif Ali, dengan mengutus panglima angkatan perangnya Sayed Syarif Osman. Maksud kedatangan utusan Siak tersebut agar Kerajaan Pelalawan tunduk kepada Siak, dan sekali setahun memberikan upeti kepada Siak. Hal itu membuat Maharaja Sinda II murka, dan menolak keinginan itu. Beliau menyatakan bahwa Kerajaan Pelalawan sejak terputus dengan Kerajaan Melayu Johor-Riau sudah berdiri sendiri, dan menjadi kerajaan yang berdaulat.

Pada tahun 1806 Kerajaan Pelalawan diserang oleh Siak dibawah pimpinan panglima perangnya Sayed Syarif Osman. Dengan panglima Batin Hitam dan Laksamana Sri Amar Wangsa Maharaja Sinda II dapat memukul mundur pasukan Siak. Serangan yang dilakukan dari Tebing Tinggi dengan beberapa penjajab dapat ditenggelamkan oleh pasukan Pelalawan, sedangkan kenderaan yang digunakan Sayed Syarif Osman ditenggelamnya. Akhirnya pasukan Siak terpaksa mundur dan untuk sementara waktu serangan ke Pelalawan dihentikan. Pada tahun 1810 Maharaja Sinda II meninggal dan digantikan oleh putera beliau Maharaja Lela II.

d. Maharaja Lela II (1810-1811)

Maharaja Lela II meneruskan sikap antipati terhadap Kerajaan Siak Sri Indrapura. Ketidaksenangan Kerajaan Pelalawan terhadap Siak dapat terlihat apabila ada ayam yang berkokok menghadap ke Siak, maka ayam tersebut harus dibunuh. Demikian pula kalau ada pisang yang bergantung menghadap ke Siak harus dipotong, bahkan makam Maha-

raja Sinda II itu sendiri tidak boleh dihadapkan ke Siak. Begitulah gambaran sikap antipati Kerajaan Pelalawan terhadap Siak.

Berita kematian Maharaja Sinda II cepat sampai ke Siak. Sultan Assyaidis Syarif Ali bersama-sama dengan saudara-saudaranya Sayed Abdurrachman, Sayed Ahmad, Tengku Lonng Putih, dan Tengku Long Hitam, melakukan serangan mendadak ke Kerajaan Pelalawan. Maharaja Lela bersama dengan Panglima Katan, Panglima Muda Kudin, serta Laksamana Sri Amar Wangsa melakukan strategi lain, yaitu membangun benteng pertahanan di Mempusun dan Tanjung Pembunuh dengan dilengkapi oleh meriam, kemudian membendung sungai Kampar dengan potongan-potongan kayu-kayu besar dan diberi rantai, sehingga para penjajah Siak terhalang.

Serangan tersebut terjadi pada awal tahun 1811, namun dengan penuh rasa semangat perjuangan baik Maharaja Lela II beserta dengan Orang Besar Kerajaan maupun seluruh rakyat mampu melakukan perlawanan, sehingga Kerajaan Siak mengalami kerugian besar. Namun pada akhirnya atas pengkhianatan dari orang Pelalawan itu sendiri, didukung oleh kondisi Gudang Mesiu Pelalawan yang terendam air, sehingga meriam-meriam yang dibanggakan itu tidak dapat berfungsi. Akhirnya Pelalawan menyerah, dan Maharaja Lela II melarikan diri ke Tambak Segati. Akibat kekalahan tersebut, berakhirilah keturunan raja-raja Kampar berkuasa di Kerajaan Pelalawan. Oleh Syarif Ali dilantiklah Sayed Abdurrachman sebagai Sultan Pelalawan dengan gelar Assyaidis Abdurrachman Fakhruuddin.

e. Assyaidis Syarif Abdurrakhman Fakhruddin (1811-1822)

Sultan Assyaidis Syarif Abdurrakhman Fakhruddin merupakan sultan Kerajaan Pelalawan keturunan Arab-Melayu, sebelumnya merupakan pimpinan perang antara Pelalawan dan Siak. Setelah dilantik sebagai sultan Pelalawan, maka diutuslah pembesar Kerajaan Pelalawan yang diangkat beliau untuk membujuk Maharaja Lela II, agar datang ke Pelalawan. Maharaja Lela II beserta orang-orang kepercayaannya dulu diberikan jaminan oleh sultan. Apabila Maharaja Lela II mau kembali ke Pelalawan, maka akan diangkat oleh Syarif Abdurrakhman Fakhruddin sebagai Orang Besar Kerajaan Pelalawan dan diberi gelar Datuk Engku Raja Lela Putera. Demikian pula Datuk Muda wakil Maharaja Lela II diangkat sultan sebagai Urat Tunggang Adat. Dengan diangkatnya Sultan Abdurrakhman sebagai sultan, maka kedudukan Kerajaan Pelalawan sejajar dengan Kerajaan Siak.

Di samping itu sultan juga memberikan jaminan kepada para penduduk yang telah melarikan diri akibat perang, dan tetap memberikan hak miliknya yang ada sebelumnya. Semua orang-orang Besar Kerajaan, para Batin, Penghulu, Kepala Suku, tetap dalam kedudukan sebagaimana biasa.

Pada tahun 1822 Sultan Assyaidis Syarif Abdurrakhman Fakhruddin wafat dan sebagai penggantinya adalah putera sulungnya bernama Sayed Hasyim dinobatkan sebagai penggantinya.

f. Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Fakhruddin (1822-1828)

Sultan ini pernah memangku jabatan sebagai sultan di Kerajaan Siak, karena pada tahun 1827 Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Fakhruddin pergi ke Siak untuk melihat saudaranya Sultan Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin Syah sultan Siak kedelapan terkena penyakit otak. Selama kurang lebih setahun beliau memangku Sultan Siak. Karena menurut sejarahnya bahwa Sultan Pelalawan merupakan keturunan dari Sultan Siak, jadi wajar saja beliau diangkat untuk sementara sebagai pemangku sultan Siak yang sedang terserang sakit. Sekembalinya beliau dari Siak beliau seringkali tidak sehat dan pada tahun 1828 beliau mangkat. Beliau digelar Marhum Muda, dan digantikan oleh Sultan Ismail.

g. Sultan Assyaidis Syarif Ismail Fakhruddin (1828-1844)

Selama kurang lebih 16 tahun sultan Assyaidis Syarif Ismail Fakhruddin memerintah di kerajaan Pelalawan, beliau banyak mengembangkan dan meningkatkan tingkat ekonomi rakyatnya. Dalam angka pengembangan tersebut beliau mengadakan hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Tebing Tinggi dan Kerajaan Siak. Di samping itu sultan banyak memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyatnya di daerah Petalangan untuk mencari dan memanfaatkan hasil hutan dan madu lebah, yang kemudian melalui batin-batinnya diperdagangkan ke luar daerah.

Jadi pada masa beliau Kerajaan Pelalawan boleh dikatakan makmur, karena jalur perdagangan melalui sungai dapat dimanfaatkan, kemudian melakukan

perdagangan dengan daerah lain, terutama dalam bentuk perdagangan hasil hutan.

Pada tahun 1844 beliau wafat, beliau diberi gelar dengan sebutan Marhum Baru, sbagai pengganti beliau adalah sultan Hamid.

h. Sultan Assyaidis Syarif Hamid Abdurrakhman Fakhruddin (1844-1866)

Sultan ini adalah saudara muda dari sultan Ismail. Sewaktu beliau memerintah perkembangan agama Islam cukup meningkat. Beliau termashur karena alim dan pengetahuannya tentang agama cukup tinggi. Perkembangan agama Islam tersebut sampai ke pedalaman dan kepada suku-suku Petalangan. Dalam mengembangkan agama Islam beliau mendatangkan pemuka-pemuka agama Islam seperti mubaligh dan guru-guru agama Islam. Di antaranya yang beliau undang untuk datang ke Pelalawan dari Jambi yang bernama Syeah Mustafa.

Dalam pemerinrtahan beliau mengangkat Orang Besar Kerajaan yang diberi gelar Datuk Laksamana Mangku Diraja, yang bertugas sebagai Panglima Armada Perang Pelalawan, dan adiknya Sayed Jaafar diangkat pula sebagai Tengku Panglima Besar kerajaan Pelalawan. Beliau mangkat diberi gelar Marhum Saleh, dan penggantinya adalah Sultan Jaafar.

i. Sultan Assyaidis Syarif Jaafar Abdurrakhman Fakhruddin Tengku Besar Raja Kerajaan Pelalawan (1866-1872)

Dalam pemerintahan beliau kemudian menambah lagi seorang Orang Besar Kerajaan Pelalawan bergelar Datuk Kampar Samar Diraja Haji Mohammad Basir. Jadi pada masa pemerintahan beliau di kerajaan Pelalawan terdapat empat Orang Besar kerajaan, masing-masing :

- Datuk Engku Raja Lela Putera.
- Datuk Bandar Setia Diraja
- Datuk LAksamana Mangku Diraja
- Datuk Kampar Samar Diraja

Semasa pemerintahan Sultan Jaafar ini, beliau juga yang mengatur pakaian masing-masing Orang Besar kerajaan dan ketentuan lainnya yang menyangkut masalah tata tertib istana. Pada tahun 1872 beliau mangkat digantikan oleh Sultan Abu Bakar, beliau digelar Marhum Tengah.

j. Sultan Assyaidis Syarif Abu Bakar Abdurrahman Fakhruddin Tengku Besar Raja Kerajaan Pelalawan (1872-1886)

Beliau adalah adinda dari Sultan Jaafar. Pada masa pemerintahan Sultan Abu Bakar inilah terjadinya hubungan Kerajaan Pelalawan dengan Belanda, dengan suatu akad perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 4 Pebruari 1879. Dalam masa pemerintahannya Belanda sudah menanamkan kukunya di Kerajaan Pelalawan. Beliau wafat digantikan oleh anaknya Tengku Sentol, beliau digelar Marhum Bungsu.

k. Sultan Assyaidis Syarif Ali Tengku Sentol Abdurrahman Fakhruddin Tengku Besar Raja Kerajaan Pelalawan (1886-1892)

Sultan ini memiliki perasaan rendah diri, sehingga beliau sangat disenangi oleh rakyatnya. Dalam bidang pemerintahan beliau memiliki reputasi yang sangat meyakinkan. Dalam pemerintahan Sultan Sentol di samping bidang perekonomian dikembangkan, demikian pula dalam bidang seni budaya mendapat dukungan dan dorongan sultan. Dalam bidang seni Sultan Sentol menghimpun para seniman, demikian para tukang silat dan para tukang-tukang dikumpulkan, dan mereka diberikan gaji tetap oleh Sultan Sentol.

Dalam bidang kesenian tersebut lahirlah beberapa jenis kesenian, misalnya Nyanyi Panjang, Tarian Belian, Pencak Silat Kampar, Pencak Silat Tumbuk Pangeran, Kuntau dan sebagainya. Dalam bidang sastra muncul beberapa syair di antaranya yang terkenal adalah Syair Perang Siak, yang berisi perang antara Siak dengan Belanda, kemudian juga untuk menambah semangat juang rakyat. Pada masa pemerinrahan beliaulah terjadinya perlawanan rakyat terhadap Belanda.

Tahun 1892 beliau mangkat, di saat beliau sedang memimpin rapat kerajaan di Balairung Sari. Oleh karena itulah beliau mendapat gelar Marhum Balai. Digantikan oleh kakaknya sendiri Tengku Hasyim.

1. Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdurrakhman Fakhruddin Tengku Besar Raja Kerajaan Pelalawan (1892-1930)

Pada masa pemerintahan Sultan Hasyim, Orang Besar Kerajaan yakni jabatan Datuk Bandar Setia Diraja

diturunkan kedudukannya menjadi Bentara. Maka sekarang tinggal hanya tiga Orang Besar kerajaan, yakni Datuk Engku Raja Lela Putera, Datuk Laksamana Mangku Diraja, dan Datuk Kampar Diraja. Masa pemerintahan beliau Kerajaan Pelalawan bidang pendidikan menjadi prioritas utama beliau. Pada masa beliau, dibuka sekolah Agama dan sekolah desa. Tahun 1928 beliau mendirikan sekolah agama dinamakan "Madrasyah Hasyimiah". Kemudian pada masa pemerintahan beliau, istana sultan dipindahkan dari Kampung Dalam Sungai ke Kampung Kampar.

Pada tahun 1922 Sultan Hasyim sudah mulai sakit-sakitan, namun demikian pemerintahan terus dijalankan oleh beliau. Pada tahun 1930 beliau wafat diberi gelar Marhum Kampar. Beliau digantikan oleh puteranya Tengku Harun gelar Tengku Sulung Negara.

m. Sultan Assyaidis Syarif Harun bin Hasyim Fakhruddin Tengku Besar Raja Kerajaan Pelalawan (1940-1945)

Sewaktu Sultan Hasyim meninggal, beliau mempunyai seorang putera yang belum dewasa, sehingga pemerintahan dijalankan oleh pemangku raja dengan gelar Regent van Pelalawan, yakni Tengku Said Usman bin Ubaidillah dan juga dikenal dengan gelar Tengku Pengeran (1930-1940). Kurang lebih sepuluh tahun menjalani pemerintahan sebagai pemangku raja, beliau menyerahkan mahkota kerajaan kepada Tengku Harun, setelah Tengku Harun Putera Sulung Negara dewasa dan dianggap mampu untuk menjalankan roda pemerintahan. Setelah beliau

menyerahkan mahkota kerajaan kepada Tengku Harun, beliau diberi pension sampai akhir hayatnya, beliau wafat tahun 1947 diberi gelar Marhum Budiman.

Pada tanggal 24 Januari 1940 Tengku Harun Putera Sulung Negara dinobatkan menjadi raja kerajaan Pelalawan dengan gelar Assyaidis Syarif Harun bin Hasyim Fakhrudin Tengku Besar Raja Kerajaan Pelalawan. Pada waktu beliau memerintah oleh Pemerintah Belanda disodorkan Korte Verklaring atau Kontrak Pendek. Beliau memberikan tugas kepada Orang-Orang Besar kerajaan memegang Distrikhoofd dengan gelar Datuk. Saking sekali pemerintahan Sultan Harun singkat, karena Jepang masuk sehingga pemerintahan kerajaan dihapuskan. Kemudian dilanjutkan dengan Proklamasi tahun 1945, dan Sultan pun dengan tegas bersama Orang Besar Kerajaan membuat pernyataan taat, setia dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau turut berjuang menentang Belanda, dan diangkat sebagai Wedana di Pelalawan (Tennas Effendy, 1972 : 141).

Tengku Harun wafat pada tanggal 12 Nopember 1959, dan diberi gelar Marhum Setia Negara. Tidak ada lagi penobatan sesudah beliau, walaupun beliau memiliki beberapa putera dan puteri. Beliau adalah sultan terakhir kerajaan Pelalawan.



Sultan Assyaidis Syarif Harun bin Hasyim Fakhruddin
Tengku Besar Raja Kerajaan Pelalawan (1940-1945)

3.2.5 Kerajaan Pelalawan Pada Masa Pendudukan Belanda

Dengan terbentuknya *Compagnie Van Verre* oleh beberapa pengusaha negeri Belanda, segera diberangkatkan empat buah kapal ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan Pieter Keyzer tahun 1596. Mereka datang membawa berupa barang-barang kristal, kaca yang indah dan kain laken merah untuk dipersembahkan kepada raja Banten. Mereka datang untuk membeli lada yang diperlukan Belanda. Oleh raja Banten kesempatan ini dimanfaatkannya agar Belanda dapat membantu Banten untuk menyerang Palembang, tetapi ditolak oleh Belanda, maka mereka diusir oleh raja Banten dan permintaan mereka untuk membeli lada

tidak diberikan oleh Raja Banten.

Tahun 1598 Compagnie Van Verrememberangkatkan lagi delapan kapal di bawah pimpinan Van Neck dan Warwijk. Situasi yang menguntungkan kedatangan mereka adalah tindakan Portugis yang menghukum Banten karena telah menerima Belanda tahun 1596. (SW. Siswoyo, 1979 : 94). Akibatnya Kerajaan Banten bermusuhan terhadap Portugis dan menerima kedatangan Belanda tahun 1598, yang berjanji akan memberikan bantuan kepada Banten, jika Portugis melakukan intervensi terhadap Banten.

Keberhasilan Belanda untuk membujuk raja Banten dilanjutkan dengan melakukan hubungan dagang dengan Maluku serta daerah-daerah lainnya. Oleh Johan Van Oldenbarneveld disarankan agar perusahaan-perusahaan tersebut dijadikan satu perkumpulan dagang saja yang diberi nama Verrenigde Oost Indische Compagnie yang disingkat VOC, berarti Perserikatan Hindia Timur yang didirikan tahun 1602.

Rupanya perjalanan VOC ini pada akhirnya tidak mulus, sehingga pada tahun 1799 VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden (Sartono Kartodirdjo, 1975 : 1). Kemunduran serta kebangkrutan VOC yang telah berkalan awal abad 18 disebabkan oleh berbagai factor, antara lain pembukuan yang curang, pegawai yang tidak cakap dan korup, hutang besar, lagi pula sistim monopolinya serta sistim pakasanya dalam pengumpulan bahan-bahan/hasil tanaman penduduk menimbulkan kemerosotan moral baik para penguasa maupun dari penduduk yang menderita dari sistim tanaman paksa tersebut. Demikian pula kritik dan saran

dari partai konservatif pada parlemen Belanda.

Oleh karena itu tampuk pemerintahan kembali ke pemerintahan Belanda. Perpindahan tersebut tidak dapat diharapkan akan membawa perubahan dan perbaikan nasib bagi rakyat, bahkan sistimnya berubah. Atas usul Dr. Van Den Bosch tahun 1850 diberlakukan sistim tanaman paksa (*Cultuur Stelsel*).

Bagaimana pula situasi kedatangan Belanda di Riau tidak terlepas dari perjalanan sejarah nasional. Seperti telah disebutkan di atas, kedatangan Belanda disambut baik oleh raja-raja kita. Demikian pula terjadi pada Kemaharajaan Melayu dalam usaha mengusir Portugis dari Melaka. Pada tahun 1637 terjadi perjanjian antara Kemaharajaan Melayu dengan Belanda untuk bersama-sama menyerang Portugis di Melaka. Setelah diadakan serangan bersama akhirnya pada tahun 1641 Portugis dapat diusir dari Melaka.

Tetapi perjanjian antara Kemaharajaan Melayu dengan Belanda diingkari dan dirobek-robek oleh Belanda. Tidak sebuah isi perjanjian pun yang dipenuhi oleh Belanda. Bahkan Belanda menduduki kota Melaka untuk selama-lamanya dan diperkuat dengan benteng-benteng atas pelayaran di Selat Melaka diperketat.

Akhirnya Belanda dapat menguasai kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di daerah ini, yang dapat memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda mulai mengadakan kontrak-kontrak jangka pendek dan ada kontrak jangka panjang. Namun hakekatnya kesemuanya itu walaupun diberi dalih dan selubung “persahabatan”, nyatanya

bahwa perjanjian-perjanjian itu bersifat sepihak di mana Belanda memegang dominasi (Pemda TK I, 1980 : 53-54).

Dengan ditanda tangani kontrak-kontrak tersebut sejalan dengan perkembangan dan ditingkatkannya hak kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, dengan sendirinya hak dan kekuasaan raja-raja Melayu Riau jadi terbatas. Pemerintah Hindia Belanda semakin tajam kukunya mencengkeramkan kekuasaannya.

Akibat pengaruh politik colonial Belanda, maka sebelum tahun 1903 daerah Propinsi Riau terbagi atas daerah-daerah administratif yaitu *Geweesten*, *Afdeeling* dan *Onderafdeeling* yang berada di bawah kekuasaan seorang pamong praja bangsa Belanda (*Europes Bestuurambtenaar*) seperti *Residen*, *Asisten Residen* dan *Controleur*.

Selain itu terdapat lagi *districten* dan *onderdistricten* yang berada di bawah kekuasaan seorang pamong praja bangsa Indonesia. Jadi kesatuan administrasi yang terkecil yang dibentuk Pemerintah Belanda ialah *Onderdistrict*, kira-kira sama dengan Kecamatan sekarang (Marleyli Asmuni, 1986 : 17).

Pemerintahan Belanda menjalankan pemerintahan yang sentral. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pemerintah Belanda menjalankan azas dekonsentrasi secara terbatas, yaitu dalam kesatuan-kesatuan yang berdasarkan hukum adapt. Dalam kesatuan adat itu berjalan pemerintah otonomi asli atau *swapraja* yang dikuasai oleh raja-raja atau sultan. Sultan atau raja boleh melakukan pemerintahan di daerah masing-masing dengan batas-batas yang disebutkan dalam Kontrak

Panjang (*Lange Contract*) dan Kontrak Pendek (*Korte Verklaring*).

Salah satu kerajaan yang telah mengikat perjanjian panjang (*Lange Contract*) adalah Kerajaan Pelalawan. Di samping itu Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Indragiri, yang kemudian diperbaharui menjadi *Korte Verklaring*. Semenjak ditanda tangani perjanjian tersebut kerajaan-kerajaan itu berada di bawah naungan Pemerintahan Hindia Belanda. Kedudukan raja/sultan adalah hanya berfungsi sebagai kepala swapraja. Dalam pengertian ini swapraja hanya menjalankan "*Medebewind*" (tugas pembantu) yang didampingi oleh seorang *Controleur* atau Asisten Residen.

Boleh dikatakan bahwa permulaan abad ke 20 seluruh kerajaan-kerajaan di Riau sudah menandatangani perjanjian takluk di bawah kekuasaan colonial Belanda. Dengan demikian daerah Riau terdapat dua macam daerah swapraja dengan *zelfbestuuren landschappen* dan daerah yang langsung diperintah oleh Belanda yang dinamakan *Rechtsstreeks Bestuursgebied*. Kerajaan Pelalawan pada masa pemerintahan Belanda termasuk dalam afeeling Bengkalis. Bengkalis dulunya pernah menjadi Pusat Residensi Sumatera Timur (*ooskust van Sumatera*).

Kerajaan Pelalawan masuk dalam daerah keresidenan Sumatera Timur sesudah dikeluarkan surat putusan oleh pemerintah Hindia Belanda tanggal 31 Oktober 1877 (Anwar Syair, 1982 : 129). Dan boleh dikatakan sejak itulah mulai Pemerintahan Hindia Belanda melirik Kerajaan Pelalawan. Namun hal itu belum direalisasikan dalam suatu ikatan perjanjian. Pemerintah Hindia Belanda terlebih dahulu melakukan

pendekatan dengan Sultan Kerajaan Pelalawan, agar hubungan dengan Kerajaan Pelalawan dapat lebih ditingkatkan. Dan baru pada masa pemerintahan Abubakar (1872-1866) diikatlah suatu perjanjian persahabatan dengan suatu surat *contract* antara Kerajaan Pelalawan dengan Gouvernement Hindia Belanda yang ditanda tangani pada tanggal 4 Pebruari 1879 (Lukas Tanjung, 1977 : 12). Sejak ditanda tanganinya perjanjian itu berarti kerajaan Pelalawan berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Namun demikian Belanda tidak menempatkan Controleurnya di Pelalawan, tetapi di Selat Panjang (Mughtar Mutfi, 1977 : 270).

Setidak-tidaknya 12 tahap perjanjian yang telah dibuat antara kerajaan Pelalawan dengan Pemerintahan Hindia Belanda. Pertama pada tanggal 4 Pebruari 1879 lange *contract* pada masa pemerintahan Sultan Syarif Abu Bakar bin Said Syarif Abdul Rachman Syahabuddin, Tengku Besar Kerajaan Pelalawan, yang didampingi oleh Orang Besar Kerajaan Encik Simbok gelar Engku Raja Lela Poetera, Encik Sidik gelar Datuk Banda, Encik Cut gelar Datuk Laksamana dan Haji Muhammad Basir gelar Datuk Kampar.

Kemudian pada tanggal 23 Oktober 1882 juga kerajaan Pelalawan di bawah pemerintahan Sultan Abu Bakar membuat kontrak dengan Pemerintahan Hindia Belanda tentang Overneming Belastingen, beliau hanya didampingi oleh Maharaja Poetera dan Datuk Banda dan Datuk Laksamana.

Pada tanggal 1 Maret 1885 terjadi pula kontrak antara Pemerintahan Hindia Belanda dengan kerajaan Pelalawan. Kontrak ini disebut Onderdaanschap. Kontrak tersebut

adalah kontrak terakhir yang ditanda tangani Sultan Abu Bakar, karena pada tahun 1886 beliau mangkat dalam usia 92 tahun, dan digantikan oleh puteranya yang bernama Tengku Said Ali yang lebih dikenal dengan Tengku Sentol.

Pada masa kerajaan Pelalawan diperintahi Sayed Ali Tengku sentol bergelar Assyaidis Syarif Hasyim Abu Bakar Syahabuddin (1886-1892), beliau juga mengikat perjanjian dengan Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 20 Juni 1889 tentang *Verklaring havens, telegraaflijnen*. Namun di sebalik perjanjian tersebut Sultan Sentol tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, dan terjadi konflik antara Sultan dengan Pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1892 Tengku Sentol wafat dan digantikan oleh adiknya Tengku Sayed Hasyim. Oleh karena Pemerintahan Hindia Belanda sudah terlalu jauh menanamkan kukunya sebelum Tengku Sayed Hasyim memerintah, terjadi lagi kontrak dengan Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 29 Mei 1894 tentang Akten van vercabd en van bevesting, artinya memperkuat perjanjian terdahulu, karena masa Tengku Sentol terjadi perlawanan dengan Belanda. Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda memperkuat perjanjian pada tanggal 20 Juni 1889 terdahulu. Tanggal 9 April 1895 terjadi lagi *Lange Contract*, dan secara berturut-turut perjanjian diperkuat yakni pada tanggal 1 Desember 1898 *Suppletoir contract*, tanggal 25 Agustus 1900 tentang *Opgave van havens*, pada tanggal 29 Desember 1906 terjadi lagi *Lange Contract*, tanggal 8 April 1913 terjadi lagi *Suppletoir Contract*, dan terakhir tanggal 20 Oktober 1916 terjadi pula kontrak tentang *Aanvullende overeenkomst*.

Dengan terjadinya perjanjian tersebut, menyebabkan kerajaan Pelalawan memiliki ruang gerak yang sangat sempit, sehingga kekuasaan para sultan tidak berarti lagi. Hal ini terlihat jelas pada waktu Kerajaan Pelalawan diperintahi oleh Tengku Said Harun, yakni secara dipaksa untuk menandatangani *Korte Veklaring* atau kontrak pendek menggantikan perjanjian terdahulu (*Polirieke Contract*).

Sejak pemerintah Belanda menyodorkan *Lange Contract* dan diakhiri dengan *Korte Veklaring* kepada raja-raja Riau khususnya Kerajaan Pelalawan, maka secara otomatis raja Pelalawan telah mengakui kekuasaan tertinggi Pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian kekuasaan raja dapat diumpamakan sebagai kekuasaan simbol, raja hanya berperan sebagai simbol dan hanya diberikan kekuasaan sepanjang swapraja saja.

Hakekat perjanjian, baik panjang maupun pendek itu walaupun diberi dalihnya persahabatan tetapi secara nyata perjanjian-perjanjian itu bersifat sepihak. Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda lebih banyak memegang dominasi, sehingga lebih banyak menguntungkan Pemerintah Hindia Belanda.

Isi dari kontrak-kontrak tersebut pada prinsipnya mengatur :

1. Seluruh kerajaan/kesultanan menjadi bagian langsung dari wilayah Nederland Indie dan para sultan/raja hanya mempunyai hak pinjam.
2. Kerajaan Belanda menjadi "Yang Dipertuan" atas kerajaan Pelalawan.

3. Sumber-sumber keuangan diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan memperoleh bagian sangat kecil sebagai imbalan.
4. Pemerintah Hindia Belanda bebas mengatur ekonomi kerajaan.
5. Kerajaan Pelalawan tidak dapat lagi berhubungan dengan kerajaan lainnya, apalagi lagi berhubungan dengan luar negeri.
6. Pengangkatan/pemberhentian sultan harus dengan persetujuan Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini terlihat pada waktu pengangkatan Tengku Said Hasyim menjadi raja Pelalawan, yang disahkan oleh Goeverneur Generaal Hindia Belanda dengan Besluit tertanggal 3 Desember 1894 (Lukas Tanjung, 1977 : 12).

3.2.6 Perlawanan Masyarakat Pelalawan Terhadap Belanda

Perlawanan terhadap pemerintah Belanda merupakan perlawanan untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan, dalam bentuk penindasan-penindasan dari pemerintahan kolonial (Onghokham, 1989 : 53). Tujuan Belanda adalah untuk menghabisi para pemimpin, penguasa, serta melakukan penangkapan-penangkapan terhadap mereka setiap saat tanpa pembatasan dan pandang bulu. Siapapun yang mencoba melawan dan melakukan pemberontakan, maka Pemerintah Hindia Belanda melakukan penekanan-penekanan lahir maupun batin.

Perlawanan-perlawanan terhadap pemerintahan Belanda tidak dilakukan secara serempak atau simultan. Penentangan-penentangan terhadap Belanda sebelumnya adalah bercorak kedaerahan dan atas sebab-sebab kepentingan sendiri (Mohd Janib Bin Johari, 1982 : 72). Setiap pertentangan ataupun perlawanan terhadap Pemerintah Belanda tetap mengalami kekalahan. Hal ini disebabkan oleh karena perjuangan fisik yang dilakukan oleh pejuang, para sultan maupun rakyat belum memiliki strategis perang yang baik. Mereka berjuang hanya bersifat mempertahankan daerah masing-masing, bahkan untuk kepentingan negeri atau kerajaannya sendiri.

Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, merupakan tindakan-tindakan tersendiri saja, artinya bersifat lokal dan bukan merupakan gerakan untuk menegakkan atau berjuang yang meliputi seluruh gugusan kepulauan Indonesia. Berarti perjuangan itu belum menunjukkan perjuangan yang bersifat nasional. Masing-masing daerah memperjuangkan daerah masing-masing (Benhard Dahm, 1988 : 26).

Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda khususnya di Kerajaan Pelalawan, kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan semakin memuncak. Mereka selalu menekan terhadap kekuasaan Sultan. Walaupun sebenarnya mereka telah memberikan kekuasaan swapraja, tetapi pemerintah Hindia Belanda tetap saja ikut campur dalam pelaksanaan pemerintahan kerajaan. Pada prakteknya campur tangan Belanda itu agak bersifat sewenang-wenang, dan dilaksanakan tanpa banyak memahami kondisi setempat

(Akira Nagazumi, 1989 : 12). Hal ini mengakibatkan rasa benci dan muak pemerintahan setempat (Sultan Pelalawan) semakin mendalam, lebih-lebih pada waktu pemerintahan Sultan Sentol. Sebelumnya Sultan Kerajaan Pelalawan terhadap Pemerintahan Hindia Belanda saling harga menghargai, baik Sultan maupun Orang Besar Kerajaan dan rakyatnya. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi suatu proses perembesan kekuasaan Belanda kedalam susunan feodal pribumi yang ada (H. Baudet dan IJ. Brugmans, 1987 : 87).

Terjadi perubahan sikap kerajaan Pelalawan dan rakyatnya, yang semula simpati kemudian berubah menjadi antipati terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ada sekelompok masyarakat yang merasa diinjak-injak dan ditekan, sehingga mereka merasa hak dan martabatnya sudah jatuh. Akibatnya kehadiran Pemerintahan Hindia Belanda membawa api penyulut perlawanan. Sering kali pula kita mendengar seorang turunan raja atau kepala daerah terlampaui banyak dikurangi kekuasaan oleh pemerintah Hindia Belanda. Demikian pula kadang-kadang rakyat Pelalawan menerima perlakuan yang tidak patut, tidak benar, dan kasar dari pemerintah Belanda.

Hak dan kekuasaan Sultan dan Orang Besar Kerajaan Pelalawan dikurangi. Ada semacam hasrat yang terselebung yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu berusaha memperkenankan secara bertahap unsure-unsur demokratis ke dalam sistem feodal. Dengan demikian memungkinkan Belanda ikut campur dalam suatu keputusan dan setiap kebijaksanaan Sultan harus dimusyawarahkan dengan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini jelas ikut campur

tanggannya pemerintahan Hindia Belanda dalam sistem pemerintahan kerajaan Pelalawan. Belanda selalu mengadakan aneka tingkat kekuasaan praktis di seluruh wilayah Indonesia (Laudrey R. Kahin, 1989 : 7). Dari segala apa yang dilakukan oleh penguasa setempat, Pemerintah Hindia Belanda selalu terlibat secara praktis. Dengan demikian kekuasaan para sultan berangsur-angsur dikurangi.

Salah satu Sultan Kerajaan Pelalawan yang tidak mau tunduk dan bekerjasama dengan Belanda adalah Tengku Sentol. Dia tidak bersedia melaksanakan perjanjian yang telah dipaksakan oleh Pemerintah Belanda. Sebenarnya Sultan sebelumnya yakni Sultan Abu Bakar enggan untuk mentaati perjanjian yang telah dipaksakan untuk ditanda tangani, namun karena tekanan yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Pelalawan melalui Controleurnya di Selat Panjang membuat Sultan Abu Bakar tidak dapat berkutik. Namun sultan selanjutnya yakni anaknya Tengku Sentol telah menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah sultan yang tegas dan tidak mau berkompromi dengan Belanda.

Prinsip Sultan Assyaidis Syarif Ali Tengku Sentol Abdurrahman Fakhruddin Tengku Besar Raja Kerajaan Pelalawan untuk tidak tunduk terhadap perjanjian tahun 1879 sewaktu ayahandanya berkuasa, sehingga beliau melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Tengku Sentol berusaha agar campur tangan Belanda di kerajaan Siak jangan sampai terjadi, sebab apabila terlaksana campur tangan Belanda di kerajaan Pelalawan, maka hilanglah kewibawaan dan kedaulatan Sultan atas kerajaan. Oleh sebab itulah politik *divide et impera* selalu dilakukan pemerintah

Hindia Belanda. Dengan politik tersebut maka antara sesama Orang Besar Kerajaan Pelalawan terjadi konflik. Demikian pula sesama rakyat terjadi perselisihan, yang pada akhirnya kekuasaan sultan akan terancam. Setelah itu barulah dengan mudah Belanda melakukan misinya terhadap kerajaan.

Di samping itu kerajaan Pelalawan selalu diintimidasi oleh Pemerintah Hindia Belanda, baik berkaitan dengan hak dan wewenang Sultan Sentol, Orang Besar Kerajaan, pemungutan pajak dan upeti yang harus dibayar oleh sultan kepada pemerintah Hindia Belanda. Tengku Sentol tidak tinggal diam, walaupun gejala menunjukkan bahwa Pemerintah Belanda sudah mulai mengobarkan api peperangan dan sudah mulai memperagakan kekuatan persenjataannya. Hal tersebut tidak membuat rasa takut dan gentar Sultan Sentol. Beliau memberi penguatan dan motivasi kepada rakyat beserta Orang-Orang Besar Kerajaan untuk berperang melawan Pemerintah Belanda.

Pada tahun 1890 terjadilah perlawanan rakyat Kerajaan Pelalawan terhadap Pemerintahan Hindia Belanda. Dalam peperangan tersebut kerajaan Pelalawan langsung dipimpin oleh Tengku Sentol dan dibantu oleh Panglima Muda Canang. Dalam peperangan tersebut Tengku Sentol selalu mengumandangkan perang fisabilillah, berjuang dijalan Allah, berjuang untuk mengusir penjajahan Belanda yang telah mengakibatkan hak dan wibawa pemerintahan kerajaan Pelalawan telah diinjak-injak, kebebasan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terasa di tekan. Dengan motivasi yang diberikan Tengku Sentol, membuat rakyat bahu membahu dan mempunyai semangat juang yang

tinggi, walaupun dengan pengorbanan sampai ke titik darah yang terakhir.

Sebagai basis pertahanan dan pemusatan kekuatan dipilihlah Kerumutan. Kerumutan sebagai pusat perjuangan Panglima Muda Canang melawan Belanda dengan dukungan rakyat Pelalawan berlangsung kira-kira setahun. Dalam peperangan tersebut Belanda juga menghadapi kendala, karena tempat sebagai basis atau benteng dari kerajaan Pelalawan sangat strategis. Apabila Belanda tidak memiliki strategi yang jitu maka pejuang-pejuang kerajaan Pelalawan dengan mudah menembak pasukan Belanda, karena letaknya agak tinggi sehingga mudah mengawasi Belanda dari atas Tanjung Kerumutan. Di samping itu Tengku Sentol bersama Panglima Muda Canang telah membuat parit-parit pertahanan, dan menyiapkan seperangkat persenjataan, misalnya meriam, pedang, kelewang dan sebagainya.

Dilihat dari perlengkapan peperangan, antara Belanda dengan kerajaan Pelalawan sangat jauh berbeda. Pemerintah Belanda memiliki persenjataan modern, sedangkan peralatan perang kerajaan Pelalawan sangat sederhana dan tradisional. Meriam yang mereka miliki merupakan peninggalan meriam masa sultan-sultan sebelumnya. Dari perlengkapan persenjataan tersebut tentu dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap menang dan kalahnya suatu pertempuran. Namun tidak dapat kita lupakan bahwa yang tak kalah pentingnya dalam peperangan adalah semangat juang dan rasa percaya diri. Hal tersebut tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan jumlah perangkat perang yang baik, dan jumlah personil angkatan perang yang banyak dan terlatih.

Semangat perjuangan Panglima Muda Canang yang begitu kuat, ditambah lagi dengan motivasi perang dari rakyat Pelalawan yang tidak kenal menyerah, menjadikan perang tersebut telah memakan waktu selama setahun, dengan jumlah korban yang tidak sedikit dari kedua belah pihak. Yang patut dipetik dari peperangan ini adalah semangat juang dan rela berkorban yang telah mereka buktikan untuk kerajaan Pelalawan, yaitu mulai tahun 1890 sampai tahun 1891.

Berakhirnya peperangan tersebut disebabkan oleh gugurnya Panglima Muda Canang yang merupakan pemimpin yang dibanggakan oleh kerajaan Pelalawan. Panglima Muda Canang serta merta pertempuran melawan Belanda pun berakhir dan kemenangan dipihak Belanda.

Gugurnya Panglima Muda Canang beserta sejumlah pengikut-pengikutnya, menyebabkan banyak memberi pengaruh kepada pikiran maupun fisik Tengku Sentol. Secara berangsur-angsur fisik Tengku Sentol bertambah lemah, dan kelihatannya bertambah uzur, namun motivasi tetap diberikan kepada rakyatnya untuk tetap melawan terhadap Belanda.

Dalam suatu pertemuan kerajaan di Balairung Sari yang langsung dipimpin oleh Tengku Sentol, beliau jatuh sakit dan meninggal pada tahun 1892. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membicarakan strategi baru yang akan dilakukan untuk mengusir penjajah Belanda dari kerajaan Pelalawan. Sesudah Tengku Sentol wafat, beliau diberi gelar Marhum Mangkat di Balai. Beliau telah tiada, namun semangat perjuangan rakyat tetap terpatery di sanubari masing-masing. Beliau digantikan oleh kakaknya Tengku Hasyim. Pada masa pemerintahannya

Pemerintah Hindia Belanda terus melakukan tekanan-tekanan, sehingga hak dan kekuasaan sultan dipersempit. Kontrak politik tetap dilakukan dan hal ini terus berlanjut pada sultan-sultan kerajaan Pelalawan berikutnya.

3.2.7 Berakhirnya Pendudukan Belanda di Kerajaan Pelalawan

Tanggal 7 Desember 1941 meletus Perang Pasifik. Jepang membom armada Amerika Serikat di Pearl Harbour. Pada tanggal 8 Desember 1941 Amerika Serikat, Inggris dan Belanda menyatakan perang terhadap Jepang (Nio You Lan, 1962 : 282). Dengan demikian praktis Pemerintah Hindia Belanda secara langsung terlibat dalam peperangan tersebut.

Dalam menghadapi Jepang Belanda berusaha mengambil hati rakyat agar rakyat Indonesia dan bersedia mempertahankan kekuasaan Belanda. Maka Belanda membentuk Komisi Visman pada bulan Nopember 1941. pada bulan Nopember itu juga misi memutuskan dan menjanjikan satu perubahan ketatanegaraan bagi bangsa Indonesia setelah perang selesai. Rakyat Pelalawan khususnya bersikap masa bodoh terhadap itu. Kepercayaan rakyat terhadap Pemerintahan Hindia Belanda semakin berkurang, bahkan ada yang mengharapkan agar Jepang segera cepat datang. Sementara itu propaganda Jepang semakin meluas dikumandangkan ke seluruh tanah air, dan mengharapkan agar Belanda cepat runtuh.

Di beberapa daerah di Riau Pemerintah Hindia Belanda mengumpulkan para pemuka adapt, mengatakan bahwa suatu saat Belanda akan datang kembali dan akan

berkuasa kembali di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda memberikan bujukan-bujukan kepada pemuka adapt, dan berjanji akan memberikan sesuatu apabila mereka datang kelak. Namun para pemuka adat hanya mendengar saja apa yang dikatakan Belanda, dan bersikap acuh saja atas bujukan Belanda tersebut. Demikian pula para pemuka adapt di Pelalawan.

Setelah Jepang menyerang Pearl Harbour, Inggris memperkuat pertahanannya di Singapore dan Malaya. Tetapi kekuatan Jepang jauh lebih unggul dari kekuatan-kekuatan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda sangat mengandalkan kekuatan Inggris di Singapore, karena Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia tidak dapat lagi mengharapkan bantuan kekuatan militer dari negeri Belanda.

Pada saat Singapura digempur oleh tentara Jepang, terjadi peperangan yang sangat dahsyat, dan hal ini dapat dilihat dengan jelas dari Tanjung Uban. Melihat keadaan demikian membuat tentara Belanda merasa ketakutan dan banyak tentara Hindia Belanda (KNIL) melarikan diri. Sisa-sisa tentara Belanda yang masih ada di Tanjung Pinang menuju Rengat langsung ke Pekanbaru dan kemudian Padang dan kembali ke Australia (Jamalako Sutan, tt,: 22).

Di Kerajaan Pelalawan berita kekalahan Pemerintahan Hindia Belanda sudah terdengar, dan pasukan Belanda minta perlindungan kepada Sultan dan pembesar istana kerajaan Pelalawan. Mereka memberikan janji-janji dan membujuk Sultan, Orang Besar Kerajaan dan rakyat dengan hadiah, dan menyatakan bahwa

mereka nanti akan datang ke Pelalawan. Namun oleh Sultan dan Orang Besar Kerajaan bersikap dingin. Sementara itu sisa pasukan Belanda yang ada melarikan diri ke Pekanbaru dan sebagian ada pula ke Selat Panjang.

Pada akhir tahun 1941 Belanda telah mengosongkan Pelalawan. Belanda tidak lahi memperdulikan masalah politik, pemerintahan dan perekonomian. Mereka kelihatan penuh kepanikan dan ketakutan, mereka pasrah apa yang akan terjadi. Mereka mengetahui pula bahwa tentara Jepang sudah hampir menguasai wilayah Indonesia keseluruhan. Kenyataannya sebelum pecah Perang Pasifik orang Jepang sudah banyak yang datang ke Riau dan menyebar ke seluruh daerah untuk melakukan propaganda politiknya dan menyebutkan suatu statement bahwa “Jepang Pelindung Asia, Cahaya Asia dan Pemimpin Asia” yang lebih dikenal dengan Gerakan “3 A”.

BAB IV

KABUPATEN PELALAWAN

4.1 Sebelum Terbentuknya Kabupaten Pelalawan

4.1.1 Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 1 Maret 1942, Tentara Keenam Belas Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Jenderal Hitoshi Imamura berhasil mendarat di Pulau Jawa pada tiga tempat, yaitu : di Teluk Banten (Jawa Barat), di Eretan (Jawa Barat) dan di Kragan (Jawa Tengah). Dalam waktu yang cukup singkat balatentara Jepang berhasil melumpuhkan perlawanan-perlawanan tentara Belanda. Padahal sebelum Angkatan Perang Jepang menyerbu ada sebuah semboyan yang dipopulerkan di kalangan tentara Belanda, yakni “*beter staande sterven dan knielend leven*”, artinya lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Makna lain diartikan mereka lebih baik mati di dalam pertempuran, daripada harus bertekuk lutut. Namun rupanya semboyan tersebut tidak diikrarkan dalam hati masing-masing tentara Belanda, yang akhirnya terpaksa harus menyerang bertekuk lutut kepada Jepang.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Letnan Jenderal H. Ter Poorten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda dan atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia mengumumkan pernyataan menyerah tanpa syarat kepada Angkatan Perang Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan tentara Belanda itu berlangsung di Kalijati Jawa Barat yang dihadiri pula Gubernur Jenderal Belanda Tjandra van Starckenborh Stachouwer. Dengan penyerahan tentara Belanda tanpa syarat kepada Angkatan Perang Jepang tanggal 8 Maret 1942 itu, maka berakhirlah pemerintahan penjajahan Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia, dan digantikan pula oleh penjajahan bangsa Jepang.

Awal mula kedatangan Jepang disambut dengan gembira dan diterima dengan tangan terbuka oleh rakyat yang memang sudah sangat merindukan kemerdekaan tanah airnya. Itu pula sebabnya maka tentara Jepang dianggap sebagai pembebas rakyat dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Seperti telah diuraikan di atas yang lebih dikenal semboyan "3A".

Kedatangan Jepang ke Riau melalui Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Singapura, dan mereka langsung menemui Raja-raja dan pembesar lainnya. Di kerajaan Pelalawan tentara Jepang langsung menemui Sultan Tengku Sayed Harun dan pembesar kerajaan Pelalawan, menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang, yaitu membebaskan kerajaan Pelalawan dari penjajahan Belanda, dan akan membantu setiap kesulitan. Sisa-sisa tentara Belanda yang ada dikumpulkan di depan Sultan dan Orang Besar Kerajaan,

dipukul dan dicaci maki. Pendek kata Jepang mengadakan demonstrasi, dan menyebutkan bahwa seolah-olah tentara Dai Nippon adalah “Malaikat Penyelamat dan Pembebas”.

Tentara Jepang pandai mengumbar janji dan memberi harapan kepada para Sultan/Raja maupun Orang Besar Kerajaan serta rakyat yang memang sangat menginginkan kebebasan dari belenggu penjajahan Belanda. Merka tahu betul bahwa semangat kebangsaan dan semangat kemerdekaan rakyat sedang bergelora, sehingga perlu diberikan iming-iming, agar Jepang mendapat simpati dari Sultan/Raja dan rakyat.

Kedatangan Jepang ke Riau telah melakukan perubahan sistem pemerintahan yang telah dilaksanakan Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Jepang tidak mengenal istilah Propinsi, Keresidenan Riau ditukar menjadi Syu, residennya dipanggil Syuchokan, tetapi kekuasaannya sama dengan Gubernur Militer. Kabupaten atau tempat bekas assiten Residen ditukar menjadi Bunsyu dan bupatinya disebut Bunsyucho. Daerah-daerah bekas onderafdeeling dijadikan Gun yang dikepalai oleh Guncho. Bunsyucho bertugas mengkoordinir beberapa Gun, tapi hierarchisnya pemerintahan dari Syuchokan langsung pada Guncho. Sebagai Guncho di Pelalawan adalah Cik Agus. Syuchokan dan Bunsyucho adalah orang Jepang yang berpangkat Kapten atau Letnan Satu, dan Guncho barulah boleh diangkat orang Indonesia.

Pada mulanya Jepang mengatur Riau syu dalam tiga Bun, yang terdiri dari :

1. Pekanbaru Bun membawahi :
 - a. Pekanbaru Gun
 - b. Siak Gun
 - c. Pelalawan Gun
 - d. Pasir Pengarayaan Gun
2. Bengkalis Bun membawahi :
 - a. Bengkalis Gun
 - b. Selat Panjang Gun
 - c. Bagan Siapi-Api Gun
3. Indragiri Bun membawahi :
 - a. Rengat Gun
 - b. Taluk Gun
 - c. Tembilahan Gun

Pelalawan dan Pasir Pengarayaan masuk Pekanbaru Bun. Bangkinang Gun itu sendiri terdiri dari dua Ku, yaitu Bangkinang Ku dan XIII Koto Kampar Ku masuk dalam daerah Sumatera Barat. Dan barulah terjadi perubahan Riau Syu menambah wilayah dengan Bangkinang Bun yang membawahi Bangkinang Gun dan Pasir Pengarayaan Gun, dan tidak termasuk dalam Pekanbaru Bun lagi.

Propaganda Jepang

Awal mulanya kedatangan Jepang ke Pelalawan mereka langsung menemui Sultan dan Orang Besar Kerajaan, menyatakan bahwa mereka ingin menangkap sisa-sisa orang Belanda, dan mengajak kerajaan untuk bekerjasama dan menghindari permusuhan. Bujukan tersebut sungguh termakan oleh Sultan dan rakyat Pelalawan dan sejak mulai

datang sampai dengan bergaul dengan rakyat biasa tentara Jepang menunjukkan keramahtamahan, terkesan sungguh simpati. Mereka menarik pemimpin-pemimpin rakyat dan para pemuda untuk dilatih di bidang militer. Mereka menyatakan bahwa perlunya latihan militer tersebut adalah untuk kepentingan kerajaan. Di antaranya adalah membentuk Heiho (pembantu prajurit), Keibodan (pembantu polisi), Seinehdan (barisan pemuda), Bagodan (keamanan desa) dan Fujikai (barisan wanita).

Taktik Jepang untuk melatih rakyat dalam bidang militer adalah untuk mempertahankan Jepang dari ancaman serangan Sekutu, karena Sekutu secara terus menerus melakukan konsolidasi kekuatannya, dan pada suatu waktu mereka akan datang kembali dan akan menghancurkan kekuatan Jepang.

Propaganda Jepang yang sangat berkesan adalah tetap menghormati kedaulatan Sultan dan Orang-orang Besar Kerajaan. Bendera merah putih dibiarkan berkibar, kemudian berkumandangnya lagu Indonesia Raya di radio-radio pendudukan. Jepang memperlihatkan sikap simpatik terhadap para pemimpin rakyat yang menentang pemerintahan Hindia Belanda, serta melarang orang-orang berbahasa Belanda di mana saja, kapan saja atau oleh siapa. Apabila ketahuan Jepang memberi sanksi keras.

Meninggikan peranan bahasa Indonesia atau daerah, baik dalam pergaulan sehari-hari, maupun penggunaan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Sewaktu kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, sekolah-sekolah menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda, tetapi pada masa pendudukan Jepang bahasa Belanda diganti

dengan bahasa Indonesia.

Untuk dapat mensukseskan usaha perangnya, tentara Jepang sangat giat untuk menyebarkan propaganda tersebut ke seluruh wilayah. Ungkapan-ungkapan yang sangat dikenal pada waktu itu misalnya, Asia telah kembali kepada Asia; Asia untuk bangsa Asia; dan untuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya (Sagimun, MD, 1985 : 32)/ propaganda Jepang tersebut mendapat sambutan hangat para penguasa dan rakyat. Untuk itulah rakyat mau bekerjasama dengan pemerintah Jepang.

Sikap Masyarakat Terhadap Pendudukan Jepang

Sikap ramah dan simpati Jepang terhadap Sultan maupun pemimpin rakyat berubah drastis dengan bentuk kekerasan dan tidak berkeprimanusiaan. Dalam kaitan ini sebenarnya telah terjadi pertikaian pendapat antara Jenderal Imamura dengan anggota stafnya segera setelah panglima tinggi itu tiba di Jakarta. Sekelompok perwira-perwira mengusulkan agar Jepang memberlakukan rakyat Indonesia dengan tangan besi dan jangan memberi angin kepada kaum nasionalis. Tetapi Imamura menegaskan bahwa suatu sikap keras harus dihindarkan dan diperlukan suatu sikap kebijaksanaan yang dapat menghapuskan kesan-kesan bahwa Jepang merupakan bangsa yang agresif (L. De Jong, 1991 : viii).

Sikap Jenderal Imamura tersebut untuk sementara dilakukan oleh tentara Jepang. Namun rupanya jabatan Jenderal Imamura sebagai panglima tinggi di Indonesia tidak lama, hanya beberapa bulan saja. Ia berusaha memberi wajah

manusiawi dari pendudukan Jepang (Akira Nagazumi, 1988 : xii). Tapi yang lebih penting lagi segala keinginan mempersatukan Jepang dengan bangsa Indonesia, sebagai “saudara tua”, dan segala usaha untuk menjaga tingkat kemakmuran rakyat, hanya tinggal impian belaka, dan berubahlah dengan sistem militeristik.

Terjadinya perubahan sikap Jepang tersebut direalisasikan pula dalam tindakannya sehari-hari. Kedatangan Jepang tersebut memang tidak dengan maksud jujur dan ikhlas untuk membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Tentara Jepang datang dengan niat penuh angkara murka yaitu menduduki dan menjajah, karena mereka mengetahui bahwa tanah air Indonesia terkenal kaya raya dan sangat diperlukan oleh Jepang. Semula penguasa dan rakyat belum mengetahui watak Jepang dan belakangan baru diketahui betul kasar dan beginsnya Jepang. Selama itu rakyat terpancing dengan bujuk rayu dan propaganda mereka yang rupanya hanya omong kosong belaka.

Di samping itu Jepang mulai mengibarkan bendera Hinomaru dengan kokohnya dan semua bendera merah putih yang berkibar dipaksakan untuk diturunkan. Lagu Indonesia raya yang selalu dikumandangkan dan didengar rakyat dilarang untuk diperdengarkan, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah diubah dengan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar dan guru-guru yang mengajar dikursuskan bahasa Jepang.

Sikap Jepang yang sangat dahsyat adalah membekukan semua kerajaan, termasuk kerajaan Pelalawan. Sejak itu praktis kerajaan Pelalawan tidak berfungsi lagi.

Sultan tidak menjalankan pemerintahan, hanya dianggap sebagai orang-orang terkemuka saja (IDKD Provinsi Riau, 1986/1987 : 189). Sultan dan Orang Besar kerajaan tidak memiliki hak dan kedaulatan lagi dan mereka diajak untuk bekerjasama dan tetap bersikap loyal kepada Jepang dan jangan sekali-sekali melawan atau menentang Jepang. Jepang tidak segan-segan untuk menangkap dan menghukumnya jika melakukan pelanggaran. Hal ini terlihat terhadap para raja-raja yang ditangkap Jepang diantaranya adalah Raja Kepenuhan T. Sultan Sulaiman, Raja Rokan IV Koto Yang Dipertuan Sakti beserta calon Raja T. Mahmud, Raja Junto Darussalam T. pahlawan dan T. Palitnasif adik raja Tambusai, T. Sulaiman Yang Dipertuan Sakti dan T. Pahlawan menjadi korban keganasan dan sampai meninggal di tahanan. Putera Mahkota T. Muhammad dan T. Palitnasif baru dibebaskan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, itupun setelah Jepang kalah dengan Sekutu. Sikap Jepang tersebut sungguh keterlaluan. Raja-raja atau sultan-sultan tersebut hanya dianggap sebagai orang yang terkemuka di kampungnya, tetapi tidak memiliki kuasa apa-apa, apalagi untuk memerintah. Bahkan ada beberapa raja Rokan yang kemudian ditangkap, ada keluarga raja, misalnya Tengku dari Tambusai di bawa ke Logas untuk ikut kerja paksa (Lukas Tanjung, 1977 : 44).

Di samping itu tindakan Jepang menguasai kebutuhan pangan, sandang, dan tenaga kerja. Bidang pangan, rakyat Pelalawan pada umumnya menjadi petani, baik karet maupun padi, walaupun sebagian ada sebagai nelayan.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda karet tersebut diekspor, tetapi pada jaman Jepang tidak ada yang bisa diekspor. Dengan hilangnya hasil utama tadi, banyak penduduk yang mengalihkan perhatian pada komoditi tani lainnya misalnya padi. Rupanya pemerintah Jepang mengerahkan pendudukan agar menanam padi, jagung, kacang, kedele, kacang hijau, kapas dan lainnya. Namun setelah panen, mereka tidak dapat menikmati hasilnya dengan baik. Ada ketentuan dari pemerintah Jepang bahwa 60 hingga 70 persen hasilnya adalah untuk Jepang. Kalau tidak mau menyerahkan kepada Jepang dianggap anti Jepang dan resiko yang diterima sangat berat. Siapapun yang berurusan dengan kempeti Jepang selalu dihadapi dengan pukul, tinju, tendang.

Demikian pula kebutuhan sandang, bagi rakyat hanya dapat menggunakan kain-kain kasar, dua kali saja dicuci sudah koyak. Mereka yang tidak memiliki persediaan uang cukup terpaksa memakai celana dari karung goni, dan bahkan ada yang memakai kulit kayu terap.

Tenaga para pemuda dikerahkan oleh tentara Jepang sebagai tenaga kerja untuk membuat jalan, rel kereta api dan tambang emas di Logas. Mereka ini disebut romusha. Setiap daerah harus mengerahkan tenaga kerja, apabila sultan atau penguasa tidak mau mengerahkan para pemuda untuk menjadi tenaga kerja paksa, maka tentara Jepang tidak segan-seganya melakukan tindakan. Kerja keras, tetapi makan sangat kurang, apabila dikirim 100 orang, maka yang akan pulang paling hanya 20 orang. Mereka yang pulang badan kurus kering, dan pakaian compang camping, kulit badannya penuh dengan coreng moreng, kudis, kurang gizi, akibat obat-obatan yang

kurang. Mereka meninggal tanpa diketahui oleh keluarga, sehingga dikenal sebagai “pahlawan kerja”.

Jadi, akibat tindakan pemerintah Jepang tersebut membuat sikap Sultan, Orang Besar Kerajaan dan rakyat Pelalawan bertambah benci dan muak. Kedaulatan Sultan diinjak-injak, Orang Besar kerajaan tidak berfungsi, rakyat ditindas.

Para ulama dikumpulkan, kemudian diberi indoktrinasi agar mereka turut membantu Jepang menyukseskan Perang Asia Timur Raya. Kemudian para ulama di Pelalawan dipaksakan pula untuk menandatangani ikrar yang berisi bahwa mereka akan selalu berusaha untuk menyukseskan Perang Asia Timur Raya. Keinginan ulama berbuat demikian dengan maksud agar Jepang tidak berbuat sewenang-wenang terhadap penduduk, dan para ulama pun bebas memberikan dakwah. Namun gerakan para ulama tetap dimonitor oleh Jepang dan banyak para ulama yang ditangkap dan diberikan peringatan, karena isi khotbah yang disampaikan menimbulkan antipati rakyat pada pemerintah Jepang.

Demikian pula para penduduk dilarang melakukan hubungan dengan dunia luar. Semua pesawat radio dikuasai Jepang, karena pada akhir tahun 1944 Jepang sudah memperkirakan perang akan meletus dan Jepang menghadapi musuh yang telah dikalahkannya, yakni Sekutu. Sebab kalau penduduk memiliki radio, dan mengetahui bahwa Jepang menghadapi kendala besar dalam perang, maka tentu rakyat akan melakukan tindakan balas dendam, atau melakukan perlawanan terhadap Jepang.

Demikianlah sikap antipati sultan dan aparat kerajaan, serta rakyat. Penuh kebencian dan ingin rasanya melakukan perlawanan, tetapi apa mau dikatakan, tenaga muda dikerahkan untuk bekerja, bahan makanan, dan sandang ditekan. Demikian pula persenjataan yang dimiliki sangat tidak menunjang untuk melakukan perlawanan. Kalau mau melawan tentu ibarat menantang arus, hal ini dapat disaksikan setiap saat, betapa kejamnya tindakan facismenya Jepang, bertindak dan berbuat tidak berprikemanusiaan. Penguasaan sistem pemerintahan praktis ditangan Jepang. Tidak lama proses berbaik hatinya Jepang terhadap Sultan dan rakyat, karena pada akhirnya pemerintahan raja-raja dibekukan dan seluruh wilayah Riau langsung di bawah pemerintahan Jepang (Anwar Syair, et-al, 1982 : 190).

Akhir Pendudukan Jepang di Pelalawan

Perang Pasifik atau disebut Jepang Perang Asia Timur Raya mendekati babak akhir dan Jepang mulai kehilangan pulau-pulau yang didudukinya. Bulan Pebruari 1945 Jepang kehilangan Pilipina, 1 April 1945 Amerika mendarat di Okinama, pintu kekalahan Jepang kepada Sekutu (Amerika khususnya) mulai terbuka. Dan Amerika pun nampaknya ingin menyelesaikan perang dengan secepat-cepatnya. Pertemuan Sekutu-sekutu di Postdam mengeluarkan deklarasi pada tanggal 26 Juli 1945, yang memberikan pilihan bagi Jepang sebagai berikut :

“Kami memerintahkan kepada Pemerintah Jepang untuk mengumumkan penyerahan tidak bersyarat kepada semua angkatan perangnya, dan menjalankan perintah-

perintah itu berarti mengakibatkan kehancuran total bagi Jepang” (Ahmad Subardjo Djoyohadisuryo, 1978 : 293).

Pernyataan Sekutu tersebut pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu move atau gertak saja, ternyata ambisi tersebut direalisasikan pada tanggal 6 Agustus 1945 dengan membom kota Hiroshima dan dilanjutkan pula pada tanggal 9 Agustus membom lagi kota Nagasaki oleh Amerika. Akibatnya kedua kota tersebut hancur total, dan menimbulkan korban ratusan ribu orang sekaligus.

Tantangan Jepang tidak saja menghadapi tentara Sekutu, disamping itu juga Negara Rusia. Pada tanggal 8 Agustus 1945 secara licik pula Rusia menyatakan perang kepada Jepang yang memang sudah tak berdaya. Rusia memang berhasil menanggung di air keruh (M. Ridhwan Indra, 1987 : 94).

Berita kekalahan bala tentara yang Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 sudah tersiar di daerah Riau pada akhir bulan Agustus 1945. Berita ini diyakini kebenarannya karena dalam sikap sehari-hari yang ditampakkan oleh Jepang sudah berubah secara drastic. Semula kelihatannya sangat sadis dan bengis, tetapi saat itu kelihatan sekali perasaan gelisah dan ada yang mengucurkan air mata.

Rapat rahasia dilakukan oleh Kaisar Jepang Hirohito berkenaan dengan tuntutan Sekutu yaitu agar Jepang segera mungkin menerima deklarasi Postdam tersebut. Keinginan Kaisar untuk menerima deklarasi tersebut paling tidak disebabkan oleh dua factor yang memaksa Jepang menyatakan bersedia menerima syarat-syarat yang dikemukakan oleh

Sekutu, yaitu ikut sertanya Uni Soviet dalam peperangan melawan Jepang, dan ledakan-ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki (I. De Jong, 1991 : ix).

Kejatuhan Jepang secara langsung membawa angin segar kepada bangsa Indonesia, sebab Jepang telah memberikan pernyataan akan kemerdekaan bagi Indonesia. Janji Jepang itu diperlihatkannya yakni dibentuknya BPUPKI tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang (Soeroto, 1975 : 29).

Tetapi janji pertama untuk memberikan kemerdekaan itu tidak begitu tegas bunyinya. Bunyi kalimatnya ialah "Hindia Timur akan dimerdekakan di kemudian hari." Hindia Belanda tersebut maksudnya adalah Indonesia, sedangkan di kemudian hari tidak jelas kapan pelaksanaannya.

Oleh sebab itulah pada akhir-akhir pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Agustus 1945. Jenderal Terauchi Panglima Tertinggi Pasukan Jepang di Asia Tenggara memanggil Soekarno dan Hatta beserta Rajiman Widyoningrat datang ke Dalat di luar kota Saigon, yaitu Markas Besar Tentara Jepang untuk Asia Tenggara. Adapun tujuan pemanggilan itu diucapkan oleh Terauchi seperti ditirukan oleh Bung Karno : "Sekarang terserah kepada tuan, Dai Nippon menyerahkan proses dari pada kemerdekaan rakyat Indonesia sama sekali ditangan Tuan" (Cindy Adams, 1986 : 319). Kita berusaha secara politis untuk membuktikan, bahwa kemerdekaan itu adalah berkat perjuangan bangsa, dan menghilangkan anggapan bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah Jepang. Sebab itulah waktu yang tepat untuk kemerdekaan harus dipertimbangkan secara matang oleh

tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan.

Berita kekalahannya pada mulanya oleh Jepang masih dirahasiakan. Para pemuda di Pekanbaru setelah mendengar pengumuman Kaisar Tenno Heika bahwa Perang Asia Timur Raya sudah berakhir, masih ragu, dan belum berani untuk menyebarkan berita tersebut lebih luas. Sementara itu tentara Jepang masih mondar-mandir dengan senjata terhunus, namun raut muka mereka kelihatan sedang gusar dan gelisah.

Sejak pengumuman resmi dari Tenno Heika, secara politis Jepang telah kalah. Sejak itu berakhirlah pendudukan Jepang secara menyeluruh di wilayah persada Indonesia. Tentara Sekutu yang datang ke Pekanbaru dipimpin oleh Mayor Lengley. Membonceng pula tentara Belanda yang berkedok sebagai tentara Sekutu. Kedatangan mereka adalah untuk melucuti tentara Jepang dan merehabilitasi tawanan-tawanan perang Sekutu dan interniren. Terjadilah serah terima antara Jepang dan pihak Sekutu.

Berakhirlah pemerintahan Jepang di Kerajaan Pelalawan karena seluruh pasukan Jepang yang ada di Riau, khususnya Riau daratan ditarik ke Pekanbaru. Secara total pasukan Jepang ditarik dari Pelalawan sebelum bendera merah putih dikibarkan, tepatnya pada bulan September 1945.

Dengan semangat yang berapi-api rakyat Pelalawan, melakukan demonstrasi ke markas tentara Jepang dan Jepang tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali hanya diam seribu bahasa. Tentara Jepang tidak dapat berbuat banyak, dan membiarkan apa yang diperbuat massa. Jepang tidak berani melakukan tembakan, dan sebagian senjata Jepang ada yang

dirampas oleh rakyat.

Secara total Jepang meninggalkan Pelalawan sekitar akhir Agustus 1945. Sejak itulah berakhirnya pemerintahan Jepang di kerajaan Pelalawan.

4.1.2 Sekitar Proklamasi Kemerdekaan di Pelalawan

Menjelang pertengahan bulan Agustus 1945, TS. Sagaf Osman pada waktu itu bekerja pada Perusahaan Dagang Jepang yang menangani soal pangan, sandang dan pertambangan ditempatkan di kantor Guncho Pelalawan untuk menangani keuangan pembelian padi. Beliau ditugaskan ke Pekanbaru untuk mengambil uang di kantor Riau Syuchokang dan di Pekanbaru ia ingin menemui kepalanya Fujiyama. Namun dilihatnya Fujiyama bingung dan kelihatan gelisah, tidak dapat berbuat apa-apa.

Selama di Pekanbaru TS. Sagaf Osman mendengar bahwa Indonesia sudah merdeka. Ia dapat melihat orang-orang berbisik-bisik tentang kemerdekaan dan ada pula yang membantah kebenaran berita tersebut. Seperti biasanya TS. Sagaf Osman beserta teman-temannya tinggal di hotel. Tetapi mengingat saat itu suasana tidak menentu, terpaksa tinggal di luar kota. Waktu itu sering terjadi keributan antara pemuda dengan tentara Jepang, di samping terjadi juga konflik dengan orang Cina dan Belanda.

Melihat situasi yang demikian, maka TS. Sagaf Osman kembali pulang ke Pelalawan. Dalam perjalanan pulang tersebut TS. Sagaf ditiptikan surat rahasia yang dikirim oleh Kepala Keuangan Kantor Riau Syuchokang bernama Agus Ramadhan untuk Cik Agus Guncho Pelalawan (Lukas

Tanjung, 1977 : 451). Surat tersebut memberitahukan bahwa Indonesia telah merdeka dan supaya di Pelalawan dinaikkan bendera merah putih, dan segera menurunkan bendera Jepang. Instruksi selanjutnya akan segera menyusul.

Sesampainya TS. Sagaf Osman di Pelalawan pada tanggal 29 Agustus 1945 petang, surat tersebut segera diserahkan kepada Cik Agus. Setelah mengetahui isinya antara lain menjelaskan bahwa : Republik Indonesia sudah merdeka, sudah diproklamirkan oleh Soekarno Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, maka bendera Jepangun segera diturunkan dan menaikkan bendera merah putih.

Segeralah Guncho Cik Agus mengadakan suatu rapat kilat di Pelalawan, terutama dengan Raja Pelalawan Said Harun, TS. Osman bekas regent Pelalawan, Tengku Tonel bekas Jaksa Kerapatan Tinggi Pelalawan, Kepala Polisi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya di sana. Rapat tersebut memutuskan tekad menyambut dengan sepenuhnya kemerdekaan Republik Indonesia dan bertekad bulat sehidup semati dengan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Soekarno Hatta 17 Agustus 1945. dan rapat itu dengan tekad penuh mengajak seluruh rakyat Pelalawan untuk ikut mempertahankan kemerdekaan itu (Muchtar Lutfi, et-all, 1977 : 451).

Sikap Sultan Terhadap Proklamasi

Sewaktu Jepang masuk ke Pelalawan, pemerintahan kerajaan dijalankan oleh T. Sayed Harun. Pertama kali Jepang sampai ke Pelalawan langsung menghadap paduka sultan dan menyampaikan maksud kedatangan mereka ke Pelalawan

khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Kedatangan mereka disambut ramah oleh Sultan dan aparat Kerajaan serta rakyat Pelalawan, karena Jepang telah memberi iming-iming dan janji-janji muluk, sehingga semua orang ikut terpedaya, dan yakin akan sikap baik tentara Jepang tersebut.

Sikap ramah Jepang tersebut berubah menjadi sikap bengis dan menakutkan. Kekuasaan sultan sebagai raja Pelalawan dibekukan, sehingga praktis kerajaan Pelalawan tidak berfungsi lagi. Sultan dan Orang Besar kerajaan hanya berfungsi sebagai orang-orang tua saja. Jepang menyebutkan bahwa kekuasaan mutlak di tangan Pemerintah Jepang. Semua bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan dan sebagainya dikuasai oleh Jepang.

Sultan TS Harun merasakan betapa kejam dan bengisnya tentara Jepang di Pelalawan. Jika ingin melakukan perlawanan itu tidak mungkin, tetapi perasaan dendam dan benci terhadap Jepang sudah sangat mendalam. Melawan berarti menghadapi maut, artinya mereka ditentang, ditempeleng, dipukul dan diberi kerja berat dan tidak diberi makan. Oleh sebab itulah semangat nasionalisme rakyat hanya di dalam hati masing-masing. Di samping itu doa tetap dilakukan, dengan maksud agar Jepang secepatnya meninggalkan Pelalawan, dan lepas dari penjajahan dan kolonialisme Jepang. Siapapun orangnya akan berkata bahwa dibandingkan dengan tiga ratus lima puluh lima tahun Indonesia dijajah Belanda, tidak separah dan menderita dijajah Jepang walaupun hanya kurang lebih tiga setengah tahun.

Sewaktu mendengar berita bahwa Tenno Heika menyatakan secara resmi Jepang kalah sejak itu pemerintahan

Jepang tidak berkuasa lagi di Indonesia. Para pemuda dan pemimpin bangsa mengambil kebijaksanaan dan melakukan gebrakan-gebrakan, agar bangsa Indonesia segera untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Oleh sebab itulah atas usaha para pemimpin bangsa melalui suatu ikrar dan tekad, menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masing-masing daerah secara spontanitas mendukung proklamasi tersebut dengan melakukan hal serupa seperti di Jakarta, yakni menaikkan bendera merah putih.

Daerah-daerah kerajaan di Riau, para aparat kerajaan bahu membahu bersama pemimpin rakyat untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di kewedanaan Pelalawan Cik Agus berpendidikan sekolah Pamong Belanda, serta ditambah pemuka-pemuka politik lainnya seperti Ismail Jamal, Said Arifin dari keluarga kerajaan Pelalawan, serta tokoh pemuda Bahrum Azhar yang telah mendapat pendidikan latihan pegawai Jepang, cukup agresif mengendalikan massa (Hassan Basri, 1985 : 38).

Dengan ikut sertanya keluarga kerajaan Pelalawan, demikian pula motivasi TS Harun raja Kerajaan Pelalawan terhadap proklamasi, menggambarkan sikap Sultan sebagai seorang Republikan sejati. Beliau menyatakan bahwa kekuasaan dan wewenang, istana dan perangkat kerajaan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia (Riau Pos, Rabu 30 Maret 1994).

Sikap tegasnya untuk mendukung proklamasi kemerdekaan juga telah diperlihatkan oleh Sultan pada waktu rapat kilat yang dipromotori oleh Guncho Cik Agus. Beliau mendukung proklamasi tersebut dan menyambut sepenuhnya

semua keputusan rapat pada malam tanggal 29 Agustus 1945 di Pelalawan.

Dari sikap tersebutlah pemerintah memberi penghargaan kepada Tengku Sayed Harun Sultan Kerajaan Pelalawan menjadi Kapten Tituler TNI Angkatan Darat. Sejak itu praktis kerajaan Pelalawan sudah bersatu dalam wilayah Republik Indonesia.

Pengibaran Bendera Merah Putih

Setelah persiapan yang diperlukan untuk menaikkan bendera merah putih selesai, maka disepakati secara bersama dengan Sultan, aparat kerajaan, pemimpin masyarakat, para pemuda dan masyarakat Pelalawan bahwa pada tanggal 30 September 1945 bendera merah putih mesti dikibarkan.

Sejak pukul 10.00 pagi tanggal 30 September 1945 diadakan upacara menaikkan bendera merah putih. Dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik tanpa rintangan, karena kebetulan di daerah tersebut di samping kesadaran nasionalnya besar, di daerah ini tidak ada Jepang dan Belanda (Lukas Tanjung, 1977 : 53). Karena Jepang sudah terlebih dahulu meninggalkan Pelalawan sejak mereka mendengar Jepang kalah melawan Sekutu. Jadi tentara Jepang yang tinggal di Pelalawan pulang ke Pekanbaru. Larinya tentara Jepang tersebut karena mereka tidak mau mengambil resiko, jika terjadi perlawanan rakyat Pelalawan terhadap Jepang.

Pelaksanaan upacara menaikkan bendera merah putih di Pelalawan dilaksanakan di muka Kantor Guncho Pelalawan. Upacara tersebut dihadiri oleh Tengku Said Harun, seluruh pegawai pemerintahan, kepolisian, Bagodan, serta

pemuka-pemuka masyarakat di Pelalawan. Dalam upacara tersebut Goncho Cik Agus memberikan pengumuman, diantaranya adalah :

- a. Mulai saat ini sebutan Guncho diganti dengan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia.
- b. Barisan Bagodan ditukar menjadi Barisan Pemuda Pengawal Kampung dan Kota
- c. Seluruh penduduk/rumah diwajibkan menaikkan bendera merah putih dan bendera Jepang tidak dibenarkan dikibarkan lagi. Perintah ini segera disampaikan kepada Ku Co-Ku co di dalam lingkungan Guncho Pelalawan oleh kurir-kurir yang terpercaya setelah upacara menaikkan bendera ini selesai.

Demikianlah situasi saat menaikkan bendera merah putih di Pelalawan. Semua yang hadir menyambut gembira dan merasakan arti kebebasan dari belenggu penjajahan kolonialisme dan imperialisme asing di bumi Pelalawan.

4.2 Periode 1945-1966

4. 2.1 Pelalawan Sesudah Proklamasi

Pada malam tanggal 30 September 1945 diadakan rapat, dengan mengambil tempat di gedung Sekolah Rakyat Pelalawan. Rapat memutuskan pembubaran Bagodan dan penyusunan Barisan Pemuda dengan susunannya sebagai berikut :

Ketua	: Bahrum Azhar
Wakil Ketua	: Tengku Comel dan TS. Arifin
Sekretaris	: Tengku Nazir
Kepala Perlengkapan	: TS. Nurdin

Pembubaran organisasi dan pengurus Bagodan ini diteruskan dengan segera ke daerah-daerah kecamatan dengan tugas untuk lebih meningkatkan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.

Pada minggu pertama bulan Oktober 1945, Bahrum Azhar berangkat ke Pekanbaru untuk menghubungi Pemerintah Keresidenan Riau guna mendapatkan instruksi selanjutnya tentang perjuangan Republik Indonesia. Cik Agus berangkat ke daerah-daerah kecamatan untuk memberikan penjelasan tentang kemerdekaan Indonesia, sekaligus mengambil sumpah setia seluruh pegawai negeri kepada Republik Indonesia.

Sekembalinya Bahrum Azhar dari Pekanbaru dengan membawa instruksi/perintah dari Bahrul Jamal selaku Ketua Pemuda Republik Indonesia Riau, bahwa Barisan Pemuda harus diganti dengan PRI (Pemuda Republik Indonesia) dan dibentuk di tiap-tiap kecamatan dengan susunan Cabang di kewedanaan dan Ranting di kecamatan. Di tiap-tiap harus dibentuk anak-anak ranting. Selanjutnya diharuskan pula membentuk Barisan Lasykar Rakyat yang disebut Tentara Ghaib (Mughtar Lutfi, et-all, 1977 : 53). Barisan tentara Ghaib ini dipimpin oleh E. Abdul Majid Khalifah di Pelalawan. Atas instruksi Wedana Pelalawan dan Kepala polisi Pelalawan, maka tentara Ghaib inipun dibentuk di tia-tipa kampung yang bertugas melatih pemuda-pemudi di daerah masing-masing.

TS. Harus Raja Pelalawan beserta dengan TS. Osman memelopori memanggil seluruh tokoh-tokoh ahli silat dan pendekar serta ahli kebatinan di lingkungan kerajaan Pelalawan. Diantaranya yang terkenal nama-nama : Pendekar

Lembini, Pendekar Latif, Mejolelo Bangun, Cik Hasan Pungguk, E. Muhammad Siak dan lain-lain.

Tanggal 10 Oktober 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI) Kewedanaan Pelalawan dengan pengurus : Abdul Muthalib Amany sebagai ketua, Ismail Jamal sebagai SETia Usaha, TS. Arifin Pembantu Umum. Pembentukan ini seterusnya sampai ke kecamatan-kecamatan.

Atas perintah dari Letkol Hassan Basri di Pelalawan dibentuk TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Bahrum Azhar sendiri telah dilantik di Pekanbaru sebagai Opsir Pertama (Letnan). Oleh Cik Agus dan Bahrum Azhar dikumpulkannya pemuda-pemuda bekas Heiho dan Gyu Gun, diantaranya : M. Yusuf Buyuk, Rustam, Kitan. Di samping itu turut serta pula TS. Nurdin, TS. Daud, TS. Hamzah, TS. Muhammad, TS. Mahmud, Abdullah Ahmad dan sebagainya. Mereka-mereka inilah sebagai anggota TKR pertama di Pelalawan. Jumlah TKR tersebut 37 orang yang diresmikan IShak Sunaryo sebagai Wakil Komandan Batalyon IV/IV Pekanbaru secara langsung di Pelalawan pada tanggal 20 Oktober 1945. TKR Pelalawan di pimpin oleh Lettu Bahrum Azhar dan TS. Nurdin dengan pangkat Letnan Dua.

Tanggal 25 Oktober 1945 dibentuk pula Barisan Rakyat (Lasykar). Lasykar ini akhirnya menjadi Lasykar Fisabilillah yang dipimpin oleh E. Abdul Majid Khalifah Pelalawan, dengan wakilnya M. Harun. Penasehatnya diangkat TS. Harun dan TS. Oesman dengan pangkat MAyir Tituler. Dengan diangkatnya Bahrum Azhar sebagai pimpinan TKR, maka sebagai ketua PRI diangkat T. Comel. Peresmian pembentukan PRI Pelalawan diresmikan dengan Surat Ketua

PRI yang ditandatangani oleh Zalik Aris tanggal 29 Oktober 1945. Demikianlah keadaan Pelalawan setelah proklamasi kemerdekaan. Dan Pelalawan resmi menjadi Kewedanaan di bawah Pemerintahan Republik Indonesia.

4.1.2 Periode 1967 - 1998

Wilayah Kampar bagian hilir (bekas Kerajaan Pekantua - Pelalawan dan Kewedanaan Pelalawan) menjadi bagian Kabupaten Kampar berdasarkan SK Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 10/GM/STE/49. Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II dalam Provinsi Riau yang merupakan gabungan dari Kewedanaan Pelalawan, Pekanbaru Luar Kota, Bangkinang dan Pasir Pengaraian dengan ibukota Pekanbaru. Kemudian berubah dengan keluarnya UU No. 12 Tahun 1956, ibukota kabupaten menjadi Bangkinang. Namun, pemindahan itu baru dilaksanakan tanggal 6 Juni 1967, di masa Bupati R. Soebrantas Siswanto. Walaupun sebenarnya Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau (setelah pindah dari Tanjungpinang) sejak tahun 1959 (Tenas Effendi, 2005 : 181)

Pada masa pemerintahan Kabupaten Kampar, wilayahnya dibagi atas 4 kecamatan ditambah 1 kecamatan pembantu. Hal itu dilakukan dengan melanjutkan kebijakan yang sudah dimulai sejak Pemerintahan Sultan Syarif Jaafar (1866 -1872). Saat itu, wilayah kekuasaan kerajaan dibagi atas 4 daerah kekuasaan Datuk dan dilanjutkan dengan pembagian 4 Distrik semasa Sultan Syarif Hasyim II (1892-1930). Kecamatan tersebut yaitu :

1. Kecamatan Langgam ibukotanya Langgam.

2. Kecamatan Bunut ibukotanya Pangkalan Bunut.
3. Kecamatan Pangkalan Kuras ibukota awalnya Kuala Napuh, kemudian pindah ke Desa Kesuma, kemudian sejak 1964 pindah ke Sorek I.
4. Kecamatan Kuala Kampar ibukota awalnya Petodaan, kemudian pindah ke Teluk Dalam.
5. Kecamatan Pembantu Kerumutan ibukotanya Kopau/ Kerumutan.

Sebagai bagian dari Kabupaten Kampar, masyarakat Pelalawan merasakan kondisi ketertinggalan dibandingkan dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Kampar lainnya seperti Kampar Bagian Hulu dan Rokan Hulu. Usaha untuk memperbaikinya salah satunya dengan memiliki kabupaten sendiri. Akan tetapi, pada masa itu perkembangan sosial dan politik belum berpihak kepada mereka. Oleh pemerintah Tingkat II Kabupaten Kampar, untuk mempercepat proses pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan, maka sejak tahun 1988 dibentuklah wilayah Pembangunan II Kabupaten Kampar dengan Pembantu Bupati yang berkedudukan di Pangkalan Kerinci, dengan kewenangan yang tertentu pula.

Ide dan cita-cita untuk membentuk kabupaten sendiri dengan wilayah bekas Kerajaan Pekantua Kampar dan Pelalawan atau Kewedanan Pelalawan sudah dimulai sejak tahun 1967. Beberapa tokoh masyarakat Pelalawan waktu itu diantaranya T.S Jaafar, T.S Nurdin, H. Abdurrahman Ismay, Temasdulhak sudah pernah merintis ke arah itu. Sedangkan dari tokoh akademisi yaitu Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc (yang waktu itu menjabat sebagai Rektor Uni-

versitas Islam Riau, Pekanbaru) menyampaikan idenya secara tertulis dalam *Riau : Potensi Alam dan Sumber Daya Insani* (1995 :75) yaitu pentingnya upaya pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam rangka percepatan proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Beliau juga mengusulkan pemekaran Provinsi Riau menjadi 8 kabupaten dan 9 kotamadya. Salah satu di antaranya Kabupaten Kampar Hilir dengan ibukotanya Pangkalan Kerinci.

Sementara itu, situasi politik nasional yaitu pada masa era reformasi, setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie tanggal 9 Mei 1998, maka terjadi reformasi sosial dan politik di Indonesia. Situasi itu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Pelalawan waktu itu yaitu Tengku Dahril dan tokoh-tokoh masyarakat Pelalawan yang waktu itu juga menjabat sebagai ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hal itu juga didukung oleh kondisi beberapa daerah lain di Indonesia juga sedang memperjuangkan wilayahnya untuk dimekarkan menjadi Provinsi (seperti Bangka Belitung, Banten, Maluku Utara dan Gorontalo) dan Kabupaten seperti di Sulawesi Utara, Maluku, Lampung, Jambi, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara).

Setelah melalui perjuangan yang panjang, pada tanggal 16 September 1999 disepakatilah UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan bersama 8 kabupaten/kota lainnya di Riau.

4.2 Terbentuknya Kabupaten Pelalawan

4.2.1 Periode 1999 – sekarang

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan di wilayah Propinsi Riau. Wilayah Kabupaten Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah II yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.26.525 tanggal 26 Mei 1997. Dengan demikian Kabupaten Pelalawan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar. Kabupaten Pelalawan dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999 yang disahkan melalui Undang-Undang No. 53 tahun 1999. Ibukota Kabupaten Pelalawan adalah Pangkalan Kerinci⁴ Untuk mencapai Kota Pangkalan Kerinci dapat ditempuh melalui beberapa pintu masuk sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis.

⁴ Untuk mencapai Kota Pangkalan Kerinci dapat ditempuh melalui beberapa pintu masuk sebagai berikut :

1. Darat : melalui Kota Pekanbaru dengan melewati jalan raya lintas Timur. Melalui Kota Jambi atau Rengat (Kabupaten Indragiri Hulu) dengan melewati jalan raya Lintas Timur.
2. Laut/Sungai : melalui Penyalai di Kuala Kampar, melalui Tolam di Kecamatan Pelalawan, melalui Taratak Buluh di Kabupaten Kampar.
3. Udara : melalui Bandar Udara Sultan Syarif Haroen di kompleks PT. RAPP (Riau Pulp and Paper).

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Inderagiri Hulu dan Kabupaten Inderagiri Hilir.

Kabupaten Pelalawan pada saat penelitian ini dilakukan (2009) telah berkembang menjadi 12 kecamatan, terdiri dari 4 Kecamatan Definitif dan 8 Kecamatan Pembantu, diantaranya :

Kecamatan Definitif :

1. Kecamatan Langgam : Luas, 916,61 km²
2. Kecamatan Bunut : Luas, 1.339,96 km²
3. Kecamatan Pangkalan Kuras : Luas, 2.58,68 km²
4. Kecamatan Kuala Kampar : Luas, 4656,34 km²

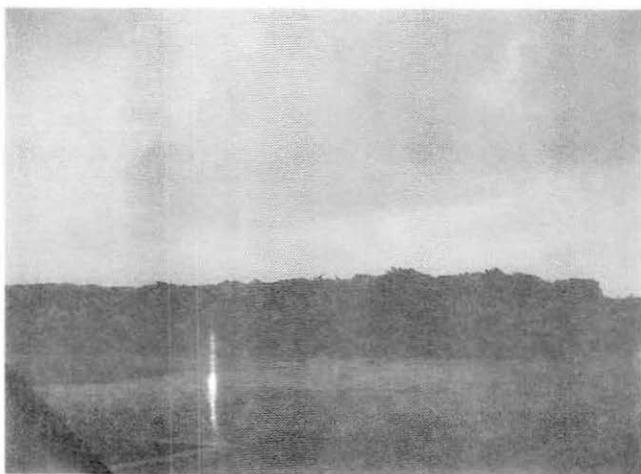
Kecamatan Pembantu

1. Kecamatan Pangkalan Kerinci : Luas, 616, 40 km²
2. Kecamatan Ukui : Luas, 407,7 km²
3. Kecamatan Pelalawan : Luas, 90,63 km²
4. Kecamatan Pangkalan Lesung : Luas, 472,73 km²
5. Kecamatan Kerumutan : Luas, 773, 86 km²
6. Kecamatan Teluk Meranti : Luas, 217,49 km²
7. Kecamatan Bandar Petalangan : Luas, 365,26 km²
8. Kecamatan Bandang Sekijang : Luas, 98,90 km²

Posisi yang strategis di jalur Lintas Utara Sumatera serta berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau dan negara tetangga merupakan keunggulan bagi Kabupaten Pelalawan untuk mengembangkan pembangunan di segala sektor.



PT Riau Pulp and Paper
(anak perusahaan Asia Pasific Resources International Holding Limited)
di Pangkalan Kerinci



PT Riau Pulp and Paper
(anak perusahaan Asia Pasific Resources International Holding Limited)
di Pangkalan Kerinci

Aktivitas pemanfaatan kekayaan dan keragaman hasil hutan juga terlihat dengan berdirinya pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara oleh PT Riau Pulp and Paper (anak perusahaan Asia Pasific Resources International Holding Limited) di Pangkalan Kerinci. Adanya pabrik ini mampu menghasilkan partisipasi terbesar dalam Produk Regional Bruto di Kabupaten Pelalawan.

Pemerintahan Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Kabupaten Pelalawan mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan Kabupaten Pelalawan mempunyai Sekretariat Kabupaten, Dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten.

Bupati dipilih oleh anggota DPRD Pelalawan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan terdiri atas :

1. Anggota perwakilan rakyat daerah yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan.
2. Anggota ABRI yang diangkat.



Pintu Masuk Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

Pejabat Bupati Pelalawan untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Riau. Sebagai daerah otonom pemerintah Kabupaten Pelalawan mempunyai kewenangan daerah, mencakup seluruh bidang pemerintah termasuk kewenangan wajib yang terdiri atas; pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.



Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan



Balai Adat Datuk Bandar Setia Diraja
terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci tepatnya di Area Perkantoran
PEMDA Kabupaten Pelalawan

BAB V

PENINGGALAN SEJARAH DI KABUPATEN PELALAWAN

Pelalawan sekarang ini adalah sebuah desa di Kecamatan Bunut. Letaknya memanjang di pinggir sungai Kampar dan sebagian lagi berada di pinggir sungai Rasau (cabang sungai Kampar) yang juga disebut sungai Pelalawan. Desa dengan pola perkembangan memanjang menurut aliran sungai ini luasnya + 239,05 km² dan penduduknya berjumlah sekitar 200 jiwa. Jika dari Pekanbaru kita akan menuju ke desa Pelalawan, maka lebih dulu kita menuju ke Pangkalan Kerinci, sebuah desa di Kecamatan Langgam atau dapat juga menuju Nilo, sebuah desa di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan memakai mobil dalam waktu lebih kurang 1 jam. Selanjutnya dari Pangkalan Kerinci atau Nilo dengan melewati sungai kita menaiki speed-boat dan sekita satu jam baru sampai di desa Pelalawan.



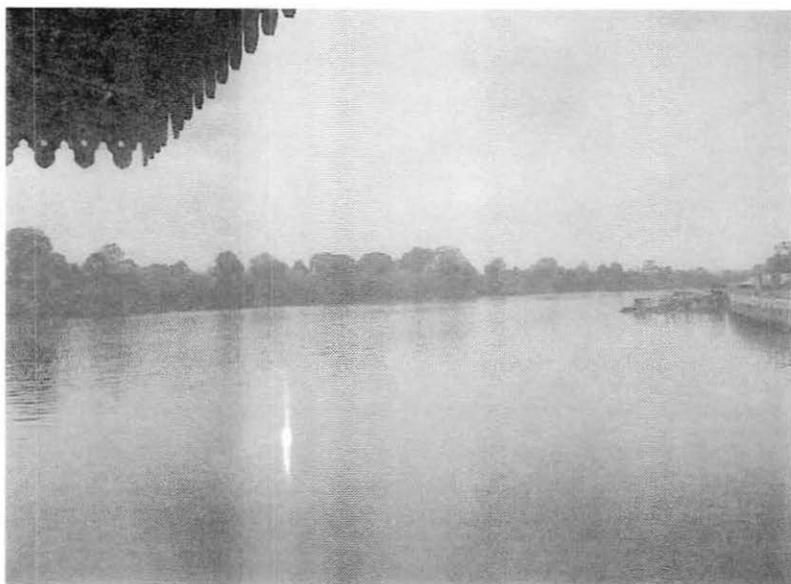
Jalan Masuk Menuju Desa Pelalawan

Pelalawan, sebagai lokasi dari situs kerajaan Pelalawan sekarang ini menampilkan sebagai sebuah desa tertinggal dan ditinggalkan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduknya yang semakin lama semakin berkurang. J. Faes dalam tulisannya *Het Rijk Pelalawan* tahun 1863 menyebutkan bahwa penduduk Pelalawan berjumlah sekitar 1100 jiwa. Manuskrip “Sejarah Kerajaan Pelalawan” yang disalin oleh T.S Djaafar Muhammad tahun 1941, menyebutkan bahwa sekitar tahun 1898 penduduk Pelalawan berjumlah sekitar 9000 jiwa dan pada waktu penobatan Tengku Said Harun sebagai raja Pelalawan tahun 1941, penduduk Pelalawan berkembang sekitar satu laksa (10.000 jiwa). Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, ketika Pelalawan

menjadi sebuah kewedanaan dalam Kabupaten Bengkalis penduduknya semakin berkembang, sehingga pada tahun 1955 penduduknya meningkat menjadi 13.000 jiwa. Namun setelah status Pelalawan sebagai daerah “kewedanaan” turun menjadi sebuah “desa”, maka secara drastis penduduk Pelalawan semakin berkurang, sehingga pada tahun 1990 penduduk desa Pelalawan hanya berjumlah 1.916 jiwa (Tenas Effendi, 1991 : 13).

5.1 Istana Sayap

Pada masa Maharaja Dinda II sekitar tahun 1725 M terjadi pemindahan pusat Kerajaan Pekantua Kampar ke Sungai Rasau (anak Sungai Kampar).



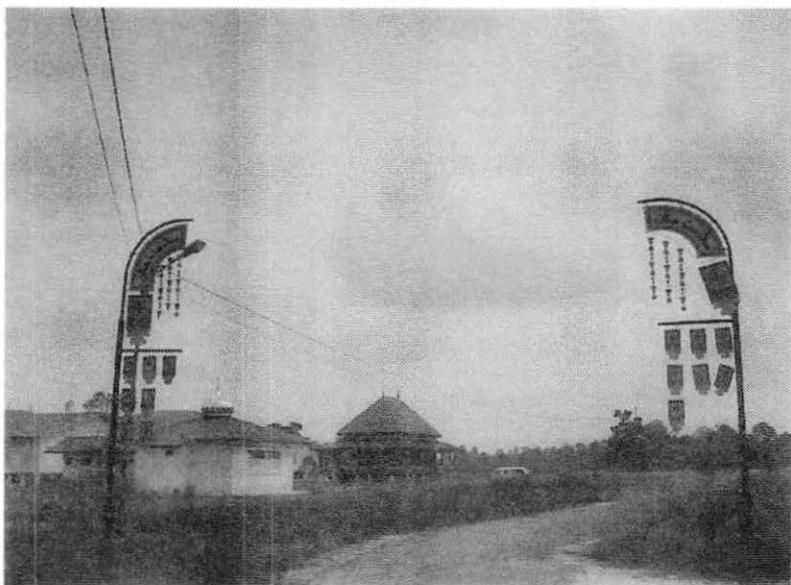
Sungai Rasau (Anak Sungai Kampar)

Sejak itu nama Kerajaan Pekantua Kampar diganti menjadi Kerajaan Pelalawan. Sungai Rasau yang terletak di Desa Pelalawan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Pelalawan hingga tahun 1945. Desa Pelalawan yang terletak di pinggiran sungai dapat ditempuh melalui transportasi sungai atau pun melalui jalan darat sekitar 45 menit dari Pangkalan Kerinci.



Kondisi Fisik Desa Pelalawan

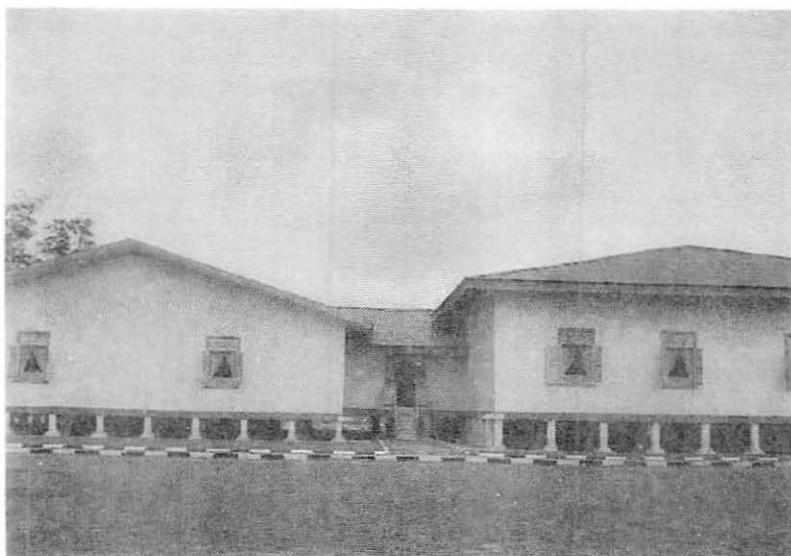
Keunikan dari Istana Sayap adalah ciri khas bangunannya memiliki 4 (empat) tiang soko yang memberi arti bahwa Kerajaan (Sultan) dalam memerintah kerajaan dibantu oleh 4 orang wakil.



Pintu Gerbang Memasuki Desa Pelalawan



Istana Sayap Tampak Depan



Istana Sayap Tampak Samping Kiri



Istana Sayap Tampak Samping Kanan



Istana Sayap Secara Utuh



Jembatan di Bagian Depan Istana Sayap Menuju Sungai Rasau

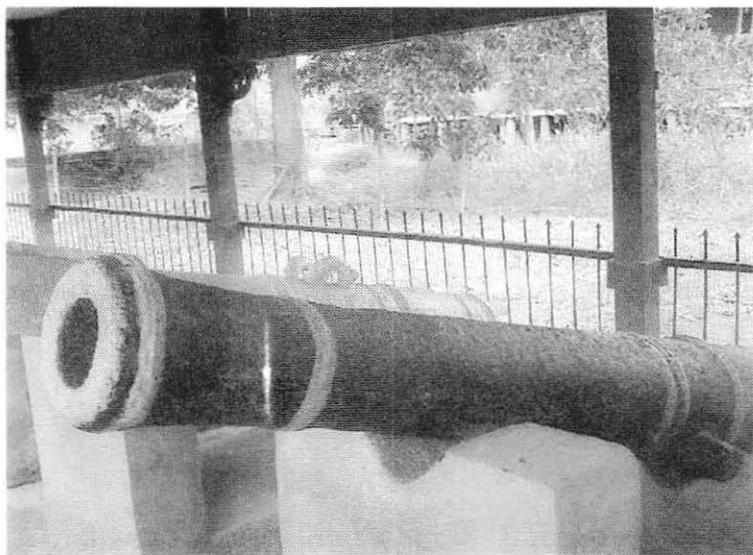


Dermaga di atas Sungai Rasau

5.2 Meriam Peninggalan Kerajaan Pelalawan



Meriam Peninggalan Kerajaan Pelalawan di Desa Pelalawan

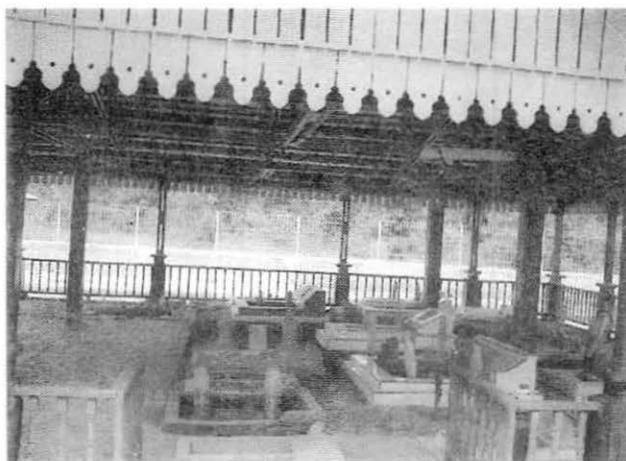


Meriam Peninggalan Kerajaan Pelalawan di Desa Pelalawan

5.2 Makam raja-raja Pelalawan

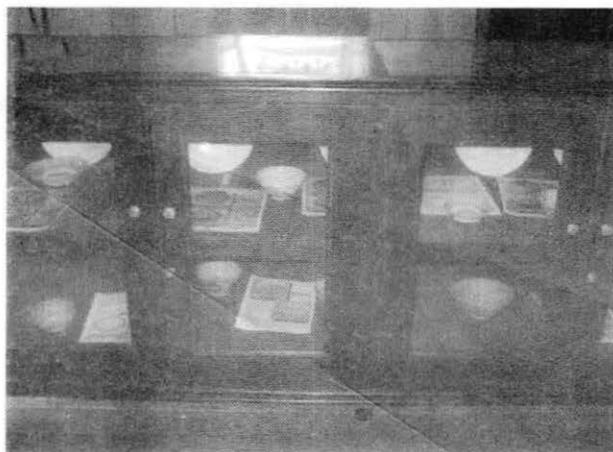


**Kompleks Makam Keluarga Kerajaan Pelalawan
di Desa Pelalawan Kecamatan Pelalawan
(Bagian Depan)**



**Kompleks Makam Keluarga Kerajaan Pelalawan
di Desa Pelalawan Kecamatan Pelalawan
(Bagian Dalam)**

5.3 Benda-benda Peninggalan Kerajaan Pelalawan



Benda-benda Peninggalan Kerajaan Pelalawan berupa piring keramik, mangkuk keramik, mata uang dan sebagainya

5.5 Bekas Pesanggrahan Panglima Kudim



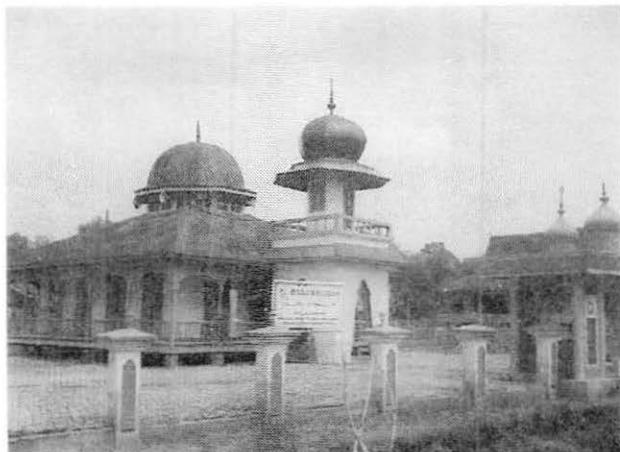
Bekas Pesanggrahan Panglima Kudim Pada Masa Kerajaan Pelalawan

5.6 Bekas Pesangrahan Datuk Setia Diraja



Bekas Pesranggahan Datuk Setia Diraja Pada Masa Kerajaan Pelalawan

5.7 Mesjid Yang Dibangun Pada Masa Kerajaan Pelalawan



Mesjid Yang Dibangun Pada Masa Kerajaan Pelalawan

5.8 Bekas Balai Pertemuan Pada Masa Kerajaan Pelalawan



Bekas Balai Pertemuan Pada Masa Kerajaan Pelalawan (Tampak Depan)



Bekas Balai Pertemuan Pada Masa Kerajaan Pelalawan (Tampak Samping)

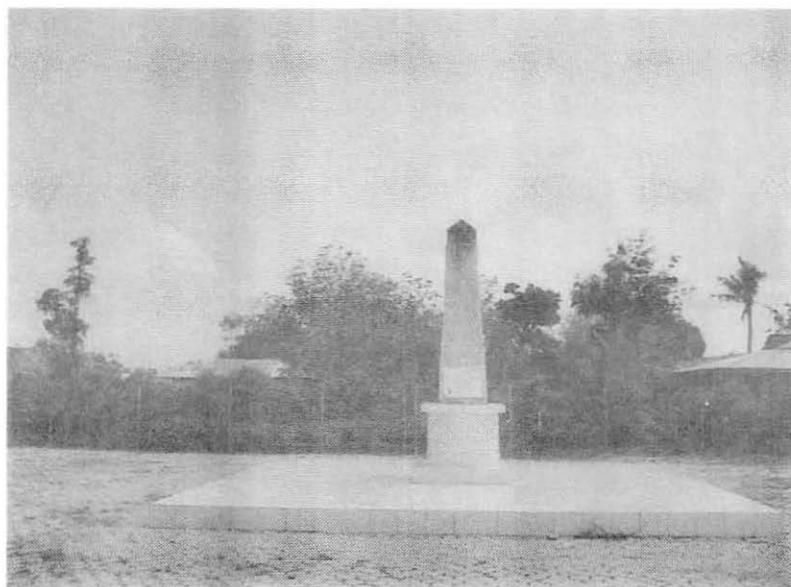
5.9 Bekas Pesanggrahan Pembesar Kerajaan Pelalawan Yang Sekarang Menjadi Museum Negeri Kabupaten Pelalawan



Bekas Pesanggrahan Pembesar Kerajaan Pelalawan Yang Sekarang Menjadi Museum Negeri Kabupaten Pelalawan (Tampak Depan)

5.10 Tugu Proklamasi Kemerdekaan

Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, Tengku Said Harun bersama orang besar Kerajaan Pelalawan menyampaikan pernyataan taat setia dan bersatu dalam Negara Republik Indonesia. Pernyataan itu dilakukan pada tanggal 20 Oktober 1945. Atas kesetiaan kepada Pemerintah Republik Indonesia tersebut, maka setelah mangkat beliau diberi gelar Marhum Setia Negara. Sedangkan untuk mengenang penyampaian pernyataan taat setia dan bersatu dalam Negara Republik Indonesia tersebut adalah dibangunnya Tugu Proklamasi Kemerdekaan RI di Desa Pelalawan.



Tugu Proklamasi Kemerdekaan Di Desa Pelalawan

5.11 Makam Sultan Mahmud Syah I

Sultan Mahmud Syah I adalah Raja Malaka terakhir yang mengundurkan diri ke Pekantua Sungai Kampar. Karena kalah dalam pertempuran dengan Portugis pada tahun 1511, beliau beserta sisa-sisa pasukannya sampai di Kerajaan Pekantua Kampar pada tahun 1526 yang langsung dinobatkan menjadi Raja Pekantua Kampar hingga mangkat pada tahun 1528 dan diberi gelar dengan “Marhum Kampar”. Makam Sultan Mahmud Syah I ini terletak di Pekantua, Desa Tolam Kecamatan Pelalawan yang dapat dicapai dengan kendaraan kapal motor atau speedboet, lebih kurang sekitar 30 menit dari Desa Pelalawan menuju arah hilir Sungai Kampar.

5.12 Makam Sultan Said Abdurrahman

Sultan Said Abdurrahman pernah melakukan ikatan persaudaraan dengan Maha Raja Lela II yang disebut “Begito” (pengakuan dunia akhirat) setelah beliau dapat mengalahkan Kerajaan Pelalawan pada masa itu. Sultan Said Abdurrahman memerintah Kerajaan Pelalawan pada tahun 1798-1822 M dengan gelar Syarif Abdurrahman Fakrudin. Sejak masa inilah Kerajaan Pelalawan diperintah oleh keturunan dari Sultan-Sultan Kerajaan Siak, karena Sultan Said Abdurrahman sendiri saudara dari Sultan Said Ali yang memerintah Kerajaan Siak pada waktu itu. Makam Sultan Said Abdurrahman terletak di Desa Pekantua (Desa Tolam) Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

5.13 Makam Sultan Assaidis Syarif Harun

Ketika Sultan Hasyim II mangkat, putranya Tengku Said Harun masih belum dewasa. Oleh karena itu, untuk pemangku Sultan diangkatlah Tengku Said Osman Bin Ubaidillah dengan gelar “Tengku Pangeran” atau disebut juga “Tengku Regent van Pelalawan”. Saat beliau mangkat (1947), beliau diberi gelar “Marhum Budiman”. Raja Kerajaan Pelalawan terakhir adalah Tengku Said Harun yang bergelar “Assaidis Syarif Harun Abdul Jalil Fakhrudin”, ketika mangkat beliau diberi gelar “Marhum Setia Negara”.

5.14 Makam Engku Datuk Raja Lela Putra

Makam Engku Datuk Raja Lela Putra terletak di Kecamatan Langgam. Pada masa lalu Datuk Engku Raja Lela Putra ini termasuk orang besar di masa Kerajaan Pelalawan.

5.15 Makam Datuk Panjang Lutut

Makam Datuk Panjang Lutut ini terletak di Desa Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

5.16 Kolam Tujuh Peninggalan Kerajaan Tambak

Kolam Tujuh yang merupakan obyek wisata sejarah peninggalan Kerajaan Tambak, terletak di Desa Langgam sekitar 25 km dari Pangkalan Kerinci. Kolam tujuh, dahulunya merupakan tempat pemandian putri-putri dari Kerajaan Tambak.

5.17 Pancang Aceh

Pancang Aceh terletak di Desa Bunut Kecamatan Bunut. Sejarah Pancang Aceh ini berawal dari seorang yang bernama Cik Jeboh yang berasal dari Tanah Aceh. Ketika beliau hijrah meninggalkan rumah lamanya di Kuala Tolam melalui Sungai Kuala Tolam, beliau menyusuri aliran di sepanjang sungai dengan memakai sampan jalur kecil. Pada akhirnya, beliau sampai di suatu tempat untuk beristirahat, lalu menancapkan sebatang kayu besar di tebing sungai. Beliau bermaksud hendak menambatkan sampannya ke pancang tersebut. Sejak itulah, pancang tersebut masih berdiri kokoh. Disitulah masyarakat setempat menamakan tempat ini dengan sebutan Pancang Aceh.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perjalanan sejarahnya, Pelalawan menyisakan beberapa nilai sejarah diantaranya :

1. Sultan Mahmudsyah I, Raja Melaka terakhir yang dipaksa Portugis meninggalkan Melaka, dalam perjalanan panjangnya sempat bertahan di Kota Kara dan Kopak (Bintan). Namun, setelah pertahanan ini dikuasai Portugis, akhirnya beliau berundur ke Pekantua Kampar. Di Pekantua Kamapr inilah beliau dinobatkan sebagai Sultan Pekantua Kampar (1526-1528 M). Fakta ini pada masa sekarang memiliki nilai sejarah yang sangat penting dalam “memersatukan” dan “merekatkan” hubungan antara orang-orang Melayu Melaka dengan orang-orang Melayu Kampar. Warisan kekentalan hubungan itu sampai sekarang masih terasa, sehingga jalinan kekerabatan antara Melayu Malaysia dan Melayu Riau khususnya tetap terpelihara dengan baik.

2. Daerah bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pekantua Kampar dan Pelalawan memiliki beberapa potensi. Tidak hanya memiliki potensi sejarah tetapi juga potensi sosial, ekonomi dan budaya. Potensi ekonomi yang sangat menonjol adalah pemanfaatan kekayaan dan keragaman hasil hutan yang terlihat dengan berdirinya pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara oleh PT Riau Pulp and Paper (anak perusahaan Asia Pasific Resources International Holding Limited) di Pangkalan Kerinci. Adanya pabrik ini mampu menghasilkan partisipasi terbesar dalam Produk Regional Bruto di Kabupaten Pelalawan.

6.2 Rekomendasi

Perjalanan sejarah Pelalawan dan peninggalannya sejarah yang ada di Kabupaten Pelalawan sebaiknya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Pelalawan. Baik sebagai identitas dan jati dirinya, namun juga untuk lebih mengenal sejarah daerahnya. Oleh karena itu beberapa rekomendasi berikut dapat menjadi acuan pemerintah daerah setempat untuk mengambil beberapa kebijakan. Diantaranya :

1. Sejarah Daerah Pelalawan dijadikan sebagai salah satu bahan muatan lokal bagi anak didik di Kabupaten Pelalawan. Sasarannya adalah generasi muda sebagai ujung tombak pembangunan lebih mengenal jati diri dan identitas daerahnya melalui pengenalan kebesaran sejarah yang pernah gemilang di masa lalu.
2. Peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Pelalawan dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Abdurachman Surjomihardjo (ed).
Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif.
Jakarta: Gramedia. 1985.
- Adil, Buyong, H. *Sejarah Malaka Dalam Taman Kerajaan
Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. 1973.
- Andaya, Barbara Watson and Leonard Andaya. *A. His-
tory of Malaya*. The Maximillian Press Ltd. Lon-
don. 1982.
- Andaya, Leonard Y. *Kerajaan Johor 1641-1728
Pembangunan Ekonomi dan Politik*. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1987.
- . *The Kingdom of Johor*. Kuala Lumpur,
Oxford University Press, London, 1975.
- Ahmad Yusuf dkk. *Sejarah Kerajaan Pelalawan*. Proyek
Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan
Daerah Riau. 1995
- Hamidy, UU. *Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam
Pandangan Orang Melayu di Riau*. Pekanbaru:
Zamrad. 1990.

- Muchtar Lutfi, et al. *Sejarah Riau*. Pekanbaru, Pemda Tk. I, Riau. 1977.
- Profil Pariwisata Kabupaten Pelalawan Tuah Negeri Seiya Sekata*. Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan. 2008
- Raja Ali Haji. *Tuhfat al Nafis*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1982.
- Sartono Kartodirdjo. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia. 1982.
- . *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900 dari Imperium sampai Imperium Mild I*. Jakarta: Gramedia. 1987.
- Tenas Effendi dkk. *Lintasan Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan)*. Pemerintah Kabupaten Pelalawan. 2005
- Sri Sutjiatiningsih, dkk. *Kepulauan Riau pada Masa Dollar*. Depdikbud. Jakarta. 1999.
- Wee, Vivienne. *Melayu: Hierarchy of Being in Riau*. Disertasi Phd. pada Australian National University, Canberra, 1984.
- Winstedt, R.O. *A History of Johor (1365-1895)*. MBRAS cetak ulang no. 6. Kuala Lumpur: MBRAS. 1979. [Terbitan pertama tahun 1932 di JMBRAS, 10 (3)]
- Wan Saleh Tamin. *Sejarah Hancurnya Singgasana Melayu I dan Timbulnya Senggasana Melayu II*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau. 1984



Anastasia Wiwik Swastiwi, adalah Peneliti Madya di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang. Mulai bekerja di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang sejak tahun 1998. Menyelesaikan pendidikan S2 Jurusan Sejarah di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2007. Sangat concern pada penelitian sejarah dan sosial budaya. Beberapa tulisannya pernah dimuat dalam beberapa media, jurnal nasional dan jurnal internasional seperti Institute Of Ocean and Earth Sciences, University of Malaya, Southeast Asian Religion, Culture and Art of the Sea



Balai Pelestarian Sejarah dan
Nilai Tradisional Tanjungpinang
2011

ISBN 978-979-1281-50-



9 789791 281508

Perpustakaan
Jenderal

9